

SKRIPSI

**PARTISIPASI DAN RESPONSIBILITAS DALAM PROSES
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA GATTARENG
KECAMATAN PUJANANTING
KABUPATEN BARRU**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021**

**PARTISIPASI DAN RESPONSIBILITAS DALAM PROSES
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA GATTARENG
KECAMATAN PUJANANTING KABUPATEN BARRU**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Administrasi
Negara**

Disusun dan Diajukan

MISBAH RIANTARI

Nomor Stambuk: 105611129217

Kepada



03/09/2021

1 exp.
smb. Alumni

R/0111/ADN/21CD
RIA
P'

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul skripsi penelitian : Partisipasi dan responsibilitas dalam proses pembangunan infrastruktur di desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Misbah Riantari

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11292 17

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



PENERIMAAN TIM

Telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0204/FSP/A.4-II/VIII/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021.



TIM PENILAI

Ketua	Sekretaris
	
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si NBM: 730727	Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si NBM: 1084366

PENGUJI:

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si ()
2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd ()
3. Dr. Abdi, M.Pd ()
4. Nurbiah Tahir S.Sos., M.AP ()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Misbah Riantari

Nomor Induk Mahasiswa : 105611129217

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 08 April 2021

Yang Menyatakan

Misbah Riantari

ABSTRAK

Misbah Riantari, Mappamiring, Amir Muhiddin. Partisipasi dan responsibilitas dalam proses pembangunan infrastruktur di desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.

Tujuan artikel ini untuk mengetahui partisipasi dan responsibilitas dalam proses pembangunan infrastruktur di desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru yang dimana berfokus pada partisipasi dan responsibilitas dalam pembangunan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan peneliti menggunakan analisis data dalam model interaktif yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan, sedangkan pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa partisipasi dan responsibilitas dalam proses pembangunan desa sudah dikatakan berhasil dalam pengambilan keputusan terkait dengan pembangunan seperti halnya kehadiran rapat, sumbangan pemikiran seperti ide atau saran yang disampaikan serta respon yang baik dari masyarakat, akan tetapi masih perlunya upaya yang lebih maksimal lagi, baik itu dari pemerintah desa serta perangkat desa maupun masyarakat setempat terkait dengan partisipasi dan responsibilitas. Dalam proses pembangunan desa memiliki beberapa kendala yakni kurangnya kesadaran masyarakat sumber daya manusia, kesibukan masyarakat, faktor internal maupun eksternal dan koordinasi pemerintah dan masyarakat.

Kata kunci: Partisipasi, responsibilitas, pembangunan infrastruktur

ABSTRACT

Misbah Riantari, Mappamiring dan Amir Muhiddin. Partisipasi dan tanggung jawab dalam proses pembangunan infrastruktur di desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.

The purpose of this study was to find out the application of the principles of participation and responsibility in the village development process in Gattareng Village, Pujananting District, Barru Regency which focused on the application of the principles of participation and responsibility in development. This study used descriptive qualitative research. Data collection techniques used the method of observation, interviews, and documentation.

The results of this study showed that the application of the principles of participation and responsibility in the village development process had been said to be successful in making decisions related to development such as attendance at meetings, contributions of thoughts such as ideas or suggestions conveyed and a good response from the community, but more efforts were still needed from the village government and village officials as well as the local community related to participation and responsibility in village development. In the village development process, there were several obstacles, namely the lack of public awareness of human resources, community activities, internal and external factors and coordination between the government and the community.

Keywords: participation, responsibility, development infrastructure

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *"PARTISIPASI DAN RESPONSIBILITAS DALAM PROSES PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA GATTARENG KECAMATAN PUJANTING KABUPATEN BARRU"*.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih untuk kedua orang tua bapak Alimuddin dan ibu Rustia yang senantiasa memberi dukungan, perhatian kasih sayang dan do'a tulus tanpa pamrih. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan tersyujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Mappamiring, M.Si selaku pembimbing I dan bapak Dr. Amir Muhidin M. Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, S. Sos, M. Si selaku Dan Fkultas Ilmmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammdiyah Makassar
3. Bapak Nasrul Haq, S. Sos, MPA selaku ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Seluruh staf pengajar, baik dosen maupun asisten dosen, staf pegawai yang ada di lingkup fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Segenap keluarga om Muh. Ikhsan Rompa dan tante Nur Ida, Nur Amina yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril ataupun materil.
6. Para pihak Dinas/ Instansi yang ada pada lingkup pemerintah Kabupaten Barru yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Serta teman-temanku Nur Avivah Musa, Hijrah Zaherina, Andi Sompas Atpas yang selalu memberikan semangat serta dukungan sedari dulu dan untuk nandos, pitto, wadda, ijjir, ikram, ani, rahma, imam dan kece squad seperjuangan Ilmu Administrasi Negara terima kasih untuk segala cerita, kenangan dan kebersamaanya selama ini.
8. Seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 08 April 2021

Misbah Riantari

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Konsep dan Teori	9
C. Kerangka Pikir.....	16
D. Fokus Penelitian.....	18
E. Deskripsi Fokus.....	19
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 22
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	22
B. Jenis Dan Tipe Penelitian	22

C. Informan	23
D. Teknik dan Pengumpulan Data	24
E. Teknik Analisis Data	25
F. Teknik Pengabsahan Data	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
A. Gambaran umum lokasi penelitian	29
B. Hasil penelitian	59
C. Pembahasan penelitian	79
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan.....	24
Tabel 4.1 Wilayah Kecamatan.....	31
Tabel 4.2 Jumlah desa dan Kelurahan	32
Tabel 4.3 Jumlah pendudu setiap Kecamatan.....	33
Tabel 4.4 luas wilayah desa Gattareng	34
Tabel 4.5 luas desa , jarak (KM), dan ketinggian dari Permukaan air laut di Pujananting	35
Tabel 4.6 banyaknya penduduk Kecamatan Pujananting	36
Tabel 4.7 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	41
Tabel 4.8 Jumlah penduduk menurut mata pencaharian desa Gattareng.....	42
Tabel 4.9 pejabat pemerintah desa Gattareng	44
Tabel 4.10 Nama-nama pengurus badan permusyawaratan desa Gattareng	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir	18
Gambar 1.2 Struktur organisasi desa Gattareng	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partisipasi masyarakat sering kali diperbincangkan dalam berbagai wilayah, baik di daerah pedesaan maupun di kota, dapat kita lihat bahwa partisipasi sangat berpengaruh karena partisipasi masyarakat menentukan suatu kondisi dalam mencapai keberhasilan suatu perencanaan atau program-program yang ada disekitar mereka. Untuk itu masyarakat di tuntut untuk ikut serta dalam pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat telah menjadi keniscayaan yang di dalamnya membangun suatu daerah, khususnya dalam skema pelaksanaan otonomi daerah yang telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 09 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah pembangunan yang merupakan wujud dari pertanggung jawaban terhadap pemerintah dalam pelaksanaan janji-janji politik yang telah disampaikan dalam berbagai koneksi pemilihan pemimpin daerah dan anggota legislatif.

Namun pada kenyataannya banyak kegiatan pembangunan diluar sana yang merupakan hasil dari perencanaan pembangunan nasional yang tidak maksimal pembangunannya atau pemanfaatannya di daerah, terutama di daerah pegunungan atau pedesaan, karena di daerah pegunungan masih adanya keterbatasan infrastruktur, kondisi pemukiman yang berpancar yang saling berjauhan antara satu sama lain, sehingga menyulitkan penggunaan terhadap sumber daya nasional atau mobilisasi penduduk.(Razak, 2018)

Partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan suatu hal yang penting untuk mencerminkan asas demokrasi dalam suatu Negara, dalam hal ini juga sangat penting ketika partisipasi publik di angkat menjadi suatu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dengan upaya untuk mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik. Dan pentingnya partisipasi publik juga memperoleh momentum yang tepat dan sering muncul di era otonomi daerah yang dimana memberikan keluasaan yang lebih besar terhadap daerah untuk merancang dan menentukan sendiri jenis pelayanan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian pemberdayaan ataupun pembangunan masyarakat desa merujuk pada tanggung jawab pemerintah desa, khususnya kepala desa serta perangkat desa sebagai pengimplementasian dalam mengelola sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di desa. Dengan adanya pemberdayaan ataupun pembangunan desa maka masyarakat memiliki kekuatan ataupun kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan serta keputusan-keputusan yang mempengaruhinya.(Pebrian, 2015)

Keadaan didalam suatu desa sangat beragam serta bervariasi antara satu desa dengan desa lainnya. Keberagaman serta keunikan desa dapat dilihat dari potensi sumber daya alam (SDA) yang dimilikinya, serta sumber daya manusia (SDM) di daerah desa tersebut, adapun perbedaan yang sering terjadi

di dalam suatu desa seperti adanya desa yang penduduknya kurang, infrastruktur yang kurang memadai, serta lokasinya sangat jauh dari perkotaan, adapun desa sangat potensial atau kesanggupan dan keandalan desanya sangat baik.

Berdasarkan dari uraian diatas maka, pemerintahan desa memiliki responsibilitas atau tanggung jawab dalam struktur pemerintahan di Indonesia, dan desa merupakan suatu bagian yang terstruktur dalam pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat berdasarkan kewenangan atau hak yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun yang diberikan oleh pusat sesuai dengan Undang-undang N0. 6 Tahun 2014 (Pebrian, 2015).

Dari hasil observasi awal penulis dapat ditemukan, pokok permasalahan khususnya seperti pembangunan fisik desa di desa Gattareng, yang dimana desa Gattareng mengalami pelaksanaan tata kelola pembangunan fisik maupun non fisik desa yang masih jauh dari harapan, dan bisa dilihat sejauh ini pembangunan fisiknya bermasalah dalam pembangunan jalan umum, pembangunan jalan desa, dan pembangunan fisik lainnya. Desa Gattareng sendiri termasuk berada pada lintasan jalan umum masyarakat menuju lahan pertanian masyarakat desa lainnya, beberapa bagian jalan yang rusak, jalan desa belum dibuat dengan baik, dan cepat mengalami kerusakan. Partisipasi dan responsibilitas masyarakat ataupun pemerintah yang terlibat belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, seperti halnya yang sering muncul terkait dengan keikutsertaan serta tanggung jawab pemerintahan atau

masyarakat dalam pembangunan desa , serta pembangunan fisik yang tidak sesuai dengan rencana.

Selain itu desa Gattareng bisa dikatakan desa yang tertinggal dalam proses pembangunan infrastruktur. Dimana partisipasi masyarakat sangat kurang serta rasa tanggung jawab terhadap desanya sendiri, masyarakat selalu diikutsertakan akan tetapi dalam hal ini masyarakat belum memiliki kesadaran bagaimana pentingnya dalam membangun desa sendiri, untuk pertanggung jawaban, masyarakat acuh tak acuh terhadap pelaksanaan yang ada. Partisipasi dan responsibilitas dalam pembangunan infrastruktur di Desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru masih belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan oleh pemerintah ataupun masyarakat setempat, yang dimana aparat birokrasi belum mampu menciptakan suatu pelayanan yang baik dan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari tingkat pemahaman seorang pemimpin itu sendiri dan khususnya kepala desa yang memiliki wewenang atau hak penuh di daerahnya terhadap tujuan dan arti dari *good governance* itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi tentang prinsip *good governance* di desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru dengan judul “partisipasi dan responsibilitas dalam proses pembangunan infrastruktur di desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi dalam proses pembangunan infrastruktur di desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru?
2. Bagaimana responsibilitas masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur di desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru?
3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat partisipasi dan responsibilitas dalam proses pembangunan infrastruktur di desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui partisipasi dalam proses pembangunan infrastruktur di desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru?
2. Untuk mengetahui responsibilitas masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur di desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru?
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat partisipasi dan responsibilitas dalam proses pembangunan infrastruktur di desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai partisipasi dan responsibilitas dalam proses pembangunan infrastruktur di desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru ini dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya tentang penerapan prinsip pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pengetahuan lebih terhadap peneliti lainnya dan sebagai studi awal yang dapat memberikan suatu pengalaman serta wawasan bagi penulis serta menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti yang menarik bagi siapapun yang membacanya dan menjadi bahan informasi bagi calon peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Peneliti berharap bahwa penelitian ini bisa menjadi masukan atau tambahan bagi aparat pemerintah itu sendiri dalam menerapkan prinsip pemerintahan yang baik dan juga sebagai sumber atau bahan pertimbangan bagi kalangan akademisi dalam praktisi masyarakat dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat atau sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dalam mendukung penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Karnila Haeruddin, Adrian Tawai, dan Muh. Yusuf (2016) “penerapan prinsip *good governance* terhadap efektivitas perencanaan pembangunan (studi pada badan perencanaan pembangunan daerah kota Kendari) metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif penelitian ini mendeskripsikan penerapan *good governance* dalam efektivitas perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) kota Kendari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* pada badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) kota Kendari terdapat 3 prinsip pokok pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi yang sudah cukup baik, yang dimana perencanaan pembangunan kota Kendari sudah menerapkan pemerintah yang baik (*good governance*). Disisi lain efektivitas perencanaan pembangunan sudah memenuhi tiga dimensi yakni implementatif, aplikatif dan perencanaan strategic, untuk ketiga hal tersebut sudah menunjukkan kategori yang memadai (Haeruddin Karnila, 2016).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Martina Dwi Rahayu (2018) “partisipasi masyarakat dalam pembangunan insfrastruktur desa Sinarsari Kecamatan

Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah” metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penelitian ini partisipasi masyarakat sangat penting dan diperlukan untuk percepatan pembangunan yang dimana pembangunan tidak berjalan dengan baik atau maksimal tanpa adanya keterlibatan dari masyarakat. Dalam partisipasi meliputi pelaksanaan, pemanfaatan hasil serta evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dengan melihat adanya faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa Sinarsari (Arifin, 2018).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rena Marina (2018) “partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (penelitian di desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman” penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dalam penelitian ini kebijakan pembangunan desa masih perlu dibuat dengan mengikutsertakan seluruh masyarakat dalam musrembangdes agar pembangunan berhasil, untuk musrembangdes sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun secara khusus untuk keterlibatan masyarakat kebanyakan masyarakat yang hanya mendengarkan penyampaian tanpa menyampaikan ide atau saran terhadap pembangunan dan untuk kehadiran hanya sebagian dari anggota masyarakat (Marina, 2018).

B. Konsep dan teori

1. Konsep partisipasi

Menurut Adisasmita (2006) menyatakan, “partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, yang dimana peran sertanya dalam kegiatan penyusunan melalui perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek dalam pembangunan, dan merupakan suatu aktualisasi dan kesediaan serta kemampuan atau kemauan masyarakat untuk berkorban dalam berkontribusi terhadap implementasi dalam program pembangunan”.

Masyarakat dipandang sebagai suatu elemen yang terpenting dalam pembangunan, dan perlu disadari percepatan pembangunan harus dimulai dari *bottom-up* atau pemrosesan yang menggerakkan masyarakat agar berperan aktif untuk memajukan dan mensejahterakan pembangunan. Titik pembangunan memang terlihat dari partisipasi aktif terhadap masyarakat.

Beberapa alasan mengapa masyarakat perlu adanya keikutsertaan dalam berpartisipasi, sebagaimana yang ditulis Adisasmita (2006), yaitu:

1. Masyarakat memahami dan mengerti yang sesungguhnya tentang keadaan lingkungan social dan ekonomi masyarakatnya.
2. Masyarakat mampu menganalisis dan merealisasikan sebab serta akibat dari berbagai kejadian yang sering terjadi dalam masyarakat.
3. Masyarakat mampu merumuskan suatu solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat.
4. Masyarakat mampu memanfaatkan suatu sumber daya pembangunan (SDA, SDM, dana dan teknologi) yang dimiliki sehingga dapat

meningkatkan produksi dan produktivitas dalam mencapai sasaran pembangunan masyarakat.

5. Masyarakat dengan upaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya, sehingga dengan berlandaskan pada kepercayaan diri yang kuat dan mampu menghilangkan sebagian ketergantungan kepada pihak luar.

Menurut Simatupang (dalam Yuwono, 2001: 124) memberikan beberapa rincian tentang partisipasi, yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan dan apa yang kita usahakan itu semua termasuk kedalam bentuk partisipasi yang saling bahu-membahu dengan saudara kita dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
2. Partisipasi berarti pula sebagai kerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang dimana semua warga Negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam serta dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan suatu sumbangan dalam terbinanya masa depan.
3. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan pembangunan tetapi juga partisipasi merupakan suatu sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan itu sendiri memiliki nilai kemanusiaan dan cita-cita dalam keadilan social untuk tetap dijunjung tinggi.

4. Partisipasi merupakan pendorong bagi seseorang untuk memulai sesuatu yang mengarah pada pembangunan dan lain-lain dan memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia untuk generasi yang akan datang.

Dalam partisipasi masyarakat dapat terjadi pada 3 (tiga) bagian atau jenjang, yaitu:

1. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dalam setiap proses penyelenggaraan terutama dalam kehidupan masyarakat, pasti dalam kehidupan ataupun dalam berpartisipasi ini sering didapatkan, karena yang diambil ini menyangkut kepentingan bersama, dalam proses pengambilan keputusan yang terdapat dalam partisipasi itu adanya disukusi, sumbangan pemikiran dan tanggapan serta penolakan terhadap hal-hal yang disetujui dan tidak disetujui (Musnir & Yasin, 2018).
2. Partisipasi dalam pelaksanaan yaitu keikutsertaan dalam tata pelaksanaan program yang merupakan lanjutan dari sebagian rencana yang telah disepakati sebelumnya untuk memberikan kontribusi guna menunjang dalam berbagai pelaksanaan (Musnir, Ahmad; Abdi, 2016), (Musnir, Abdi, & Nasri, 2016).
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat, partisipasi ini tidak lepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan dalam program yang dicapai, dari segi kualitas dan kuantitas ditandai dengan peningkatan output dan dapat juga dilihat dari seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, dan partisipasi juga dapat dilihat dari tiga

segi, yaitu dari aspek manfaat materialnya, manfaat pribadi dan manfaat sosialnya (Mustanir & Lubia, 2017).

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan dalam program secara keseluruhan atau menyeluruh yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan yang telah dijalankan apakah sesuai dengan yang ditetapkan atau masih ada penyimpangan (Josef Riwu, 2007: 127). (Latif, Adam, 2019)

Adapun faktor-faktor yang menghambat partisipasi dalam pembangunan desa diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut serta dalam berpartisipasi
- b. Rendahnya tingkat pengetahuan dan pendidikan seseorang
- c. Adanya hubungan antara keaktifan berpartisipasi dengan keterbatasan usia
- d. Adanya perbedaan pekerjaan sehingga keaktifan masyarakat masih kurang
- e. Faktor komunikasi dimana masyarakat yang memiliki tingkat keaktifan dalam berkomunikasi cenderung lebih mengerti dibandingkan dengan masyarakat yang kurang berpartisipasi.

2. Responsibilitas

Responsibility (tanggung jawab) bersal dari kata latin *respond(us)*. Kata ini berkaitan dengan kata lain seperti *respondere, to respond*, dan *spondere, to plodge, promise*. Responsible berarti “*answerable or accountable, as for something within one's power or control.*” Responsibility juga berarti “*the state or fact of being respoinable ,*” dan “*a particular burden of obligation upon a person who is responsible*”. (Ndaraha, 2011).

Spiro (1969) menegemukakan dalam responsibilitas atau tanggung jawab dapat dibedakan dalam kondisi seperti halnya berkaitan satu sama lain yang akuntabilitas, penyebab, kewajiban. Untuk lebih lanjutnya, Webster dalam Spiro (1969) menegemukakan pendapatnya tentang responsibilitas atau tanggung jawab yaitu perilaku seseorang dalam bertanggung jawab yang rentan terhadap penjelasan rasional dan lebih jauh lagi. Secara sederhana, tanggung jawab sebagai kemampuan dalam menajawab atau memenuhi suatu janji atau komitmen, baik itu janji kepada orang lain maupun janji kepada diri sendiri dan itulah dikatakan sebagai tanggung jawab (Lihat Ndraha, 2011).

Menurut Spiro, responsibilitas atau tanggung jawab terbentuk dari beberapa aspek salah satunya adalah akuntabilitas, dan akuntabilitas mengacu pada kemampuan seseorang dalam mempertanggung jawabkan cara yang bersangkutan dalam melaksanakan atau pengimplementasian dengan tugas yang dibebankan kepadanya (Spiro, 1969). Dengan demikian tanggung jawab sebagai hal yang penting dalam proses pemabngunan ataupun hal yang bersangkutan dengan adanya tanggung jawab (Pebrian, 2015).

Levine dalam Dwiyanto (2008) mengemukakan *responsibility* (tanggung jawab) merupakan suatu ukuran yang memperlihatkan seberapa jauh proses pemberian dalam pelayanan publik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan atau atauran dalam administrasi yang terdapat dalam organisasi yang telah ditetapkan dalam menunjang kualitas atau tanggung jawab terhadap kinerja dalam pemberian pelayanan (Dwi S et al., 2020).

Responsibilitas merupakan suatu penyesuaian atau kepatuhan terhadap pengelolaan dalam perusahaan yang dimana prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku (Danhiri, 2014) dan termasuk juga kedalam perumusan seperti halnya hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup dan standar pengajian. (Saputri, 2019)

Responsibilitas adalah ukuran apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, responsibilitas merujuk pada persesuaian pelaksanaan kerja organisasi dengan prosedur dan taat kerja yang berlaku (Sidi, 2014).

Adapun ciri-ciri dalam bertanggung jawab diantaranya sebagai berikut:

- a. Melakukan apa yang sudah diucapkan.
- b. Mampu berkomunikasi dengan baik kepada siapa saja.
- c. Tidak menyalahkan orang lain secara berlebihan.
- d. Memiliki jiwa melayani dengan sepenuh hati.
- e. Menghormati dan menghargai aturan.
- f. Menjadi pendengar yang baik, termasuk dalam menerima kritik dan saran dari orang lain.

Untuk faktor-faktor yang menghambat responsibilitas atau tanggung jawab dalam proses pembangunan desa seperti;

- a) Tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam mengerjakan tugas yang diberikan.
- b) Kurang menanamkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat maupun dalam pertanggung jawaban lainnya.

3. Pembangunan infrastruktur

Menurut Riyadi dalam Rahayu (2018) mengatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan, untuk menciptakan tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup suatu masyarakat yang berkehendak dalam melaksanakan suatu pembangunan. Ciri utama yang pembangunan yang terpenting adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dimana melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya gotong royong (Mahayana, 2013).

Pembangunan merupakan suatu proses yang harus dilaksanakan agar terciptanya kesejahteraan didalamnya atau proses perubahan dalam meningkatkan kemajuan baik itu infrastruktur ekonomi dan sumber daya manusia dengan melibatkan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rompa, 2020).

Dalam hal pembangunan fisik atau infrastruktur, Bachtiar Effendi (dalam Akbar Effendi, 2014) mengatakan bahwa pentingnya infrastruktur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan yang memadai yang berupa suatu ketersediaan fasilitas terkait dengan pelayanan publik baik prasarana jalan, air bersih, listrik, jembatan, sarana pendidikan, sarana irigasi, teknologi dan komunikasi yang bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi. Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial ekonomi.

Infrastruktur adalah berbagai fasilitas fisik yang dibutuhkan dan dikembangkan oleh agen-agen publik yang bertujuan untuk memenuhi tujuan sosial dan ekonomi serta fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal pembuangan limbah listrik, penyediaan air, pembangunan limbah, dan pelayanan-pelayanan lainnya yang serupa (Latif Adam, 2019).

Secara spesifik oleh Stone (dalam kodoatie 2005: 101), infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintah dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi (Rosalina Maya, 2013).

Adapun lima faktor-faktor yang bisa mempengaruhi proses pembangunan yaitu:

1. Sumber daya alam (SDA)
2. Sumber daya manusia (SDM)
3. Ekonomi
4. Pelayanan publik
5. Partisipasi masyarakat

C. Kerangka Pikir

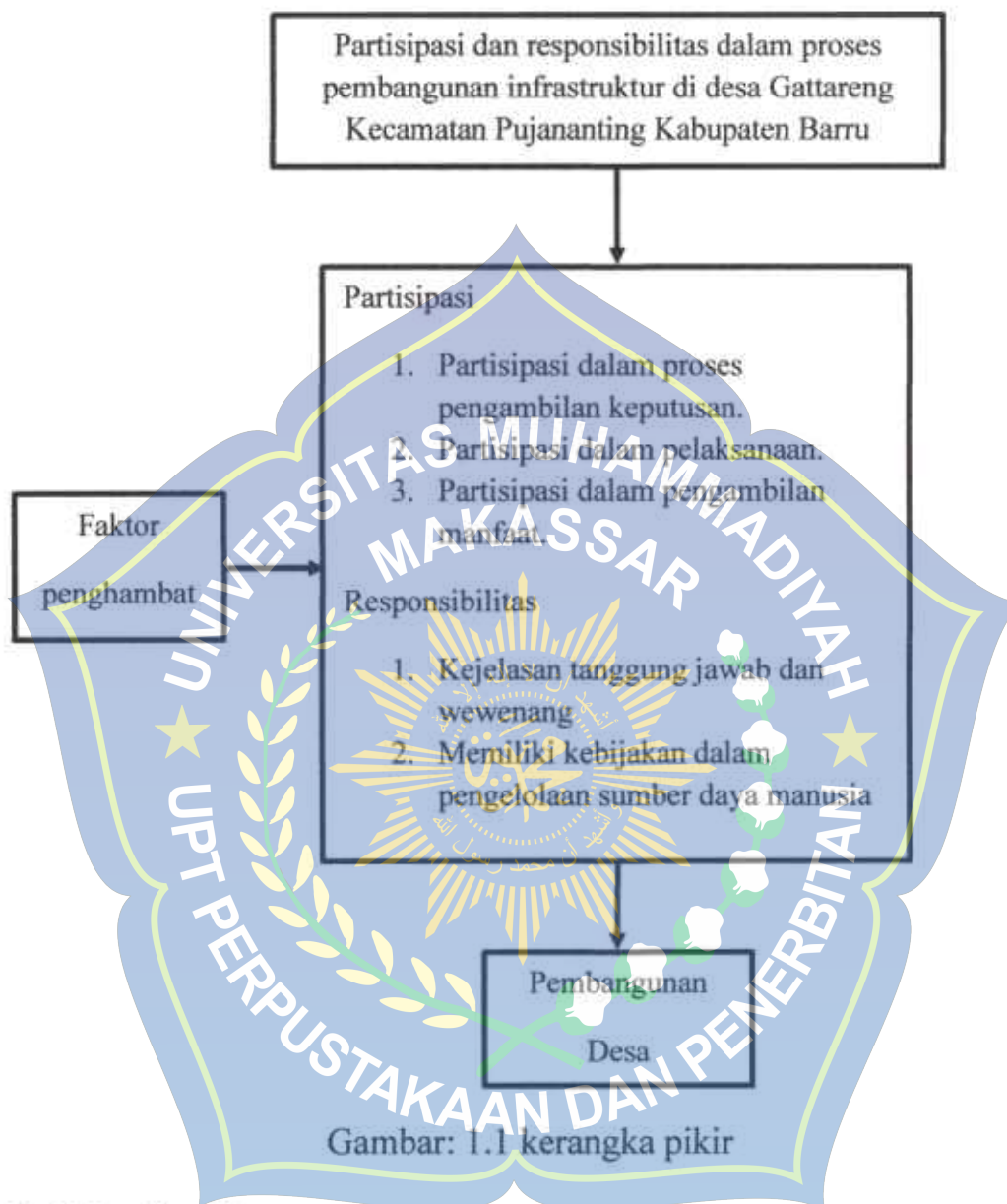
Kerangka berfikir memberikan sekilas gambaran mengenai inti dari alur pikiran yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isinya, kerangka berfikir ini didasari berdasarkan landasan teori yang lebih

lanjut akan menjadi bingkai yang mendasar pada pemecahan masalah, adapun kerangka berfikir penelitian ini adalah sebagai berikut.

Penelitian ini dilakukan di Desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabuapten Barru dengan tujuan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Negara yang baik yang solid dan bertanggung jawab atas haknya, serta efektif dan efesiensi dengan menjaga kesinergian suatu hubungan yang bermanfaat dalam rana negara atau domain-domain negara pada sektor swasta dan masyarakat dengan adanya penerapan yang diselenggarakan terhadap pemerintah.

Dalam menjalankan suatu sistem pemerintahan yang baik maka diperlukan prinsip-prinsip *good governance* yang baik untuk diterapkan bagaimana akuntabilitas yang ada dari pelaporan serta komitmen organisasi yang ada, *good governance* dijadikan sebagai acuan atau patokan untuk memperbaiki kesalahan masyarakat atau yang terjadi dalam masyarakat, dengan begitu partisipasi dan responsibilitas memiliki tujuan agar terciptanya suatu pemerintahan yang baik yang diperlukan dalam suatu organisasi dan keberhasilan, penerapan *good governance* dilihat dari aspek yang dijalankan salah satunya adalah partisipasi masyarakat sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Latif dan Adam (2019).

Berdasarkan uraian kerangka pikir diatas maka dapat digambarkan sebagai berikut:



D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka, adapapun fokus penelitian yang berpijak dari rumusan masalah adalah penerapan prinsip partisipasi dan responsibilitas dalam proses

pembangunan desa di Desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.

E. Deskripsi Fokus

Dalam pembangunan desa partisipasi dan tanggung jawab penting untuk terselenggaranya suatu pembangunan, dalam hal pemerintah desa memegang peran dalam mengikutsertakan serta memberikan tanggung jawab kepada masyarakatnya dan sebagai wakil rakyat yang terpilih dan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa yang memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, serta menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, peran serta tanggung jawab maka dari itu pemerintah desa memiliki peran penting untuk terselenggaranya suatu kegiatan atau pelaksanaan.

Dengan demikian yang menjadi fokus peneliti dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan

Dalam pengambilan keputusan ini adanya keterlibatan antara masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya atau aspirasinya dalam rapat desa seperti halnya dalam pemilihan desa, keterlibatan dalam pembangunan desa, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan seperti halnya dalam memperkirakan kebutuhan anggaran desa Gattareng.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan

Merupakan proses dari lanjutan rencana yang telah disepakati sebelumnya yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan yang ada di desa Gattareng.

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Partisipasi dalam pengambilan manfaat ini memfokuskan pada keberhasilan suatu program dengan adanya peningkatan output dan sesuai dengan target yang telah ditentukan atau ditetapkan baik dari pemerintah desa maupun dari masyarakat desa Gattareng.

4. Kejelasan tanggung jawab dan wewenang

Dalam hal ini memberikan suatu kejelasan mengenai pertanggungjawaban seorang pemimpin ataupun masyarakat yang diberikan wewenang dari pemerintah atau dari atasan untuk memberikan kepercayaan secara jelas mengenai tanggung jawab itu sendiri, dimana wajib menanggung segala kewajiban yang menanggung segala sesuatunya dan terdapat pula hak dalam melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu.

5. Memiliki kebijakan pengelolaan sumber daya manusia (SDM)

Dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) itu pada dasarnya mengidentifikasikan suatu fungsinya sebagai suatu proses perencanaan yang menjadi bagian pengembangan kebijakan dalam praktek organisasi, untuk sumber daya ini memerlukan suatu perhatian

serta pengelolaan yang didasari dalam suatu konsep perencanaan, pengarahan, dan pengembangan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dua bulan setelah seminar pra penelitian. Adapun lokasi atau tempat penelitian yaitu di Desa Gattareng Kecamatan Pujannating Kabupaten Barru tentang partisipasi dan responsibilitas dalam proses pembangunan infrastruktur di desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif yaitu data yang dikumpulkan yang tidak berupa angka melainkan data yang berasal dari hasil wawancara, dokumen pribadi serta dokumen resmi lainnya, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realita empiric dibalik fenomena yang secara detail, intens, dan tuntas data-datanya.

Penelitian kualitatif adalah suatu metode yang meneliti suatu kondisi objek alami yang dimana peneneliti sebagai instrument kunci dengan cara pengumpulan datanya dilakukan secara gabungan yang analisis datanya bersifat induktif dan untuk penelitian kualitatif lebih berfokus pada makna daripada generalisasi atau pembentukan gagasan.

2. Tipe penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif. Penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas atau fenomena dan terperinci mengenai suatu masalah yang akan diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada secara terstruktur. Tipe deskriptif didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat melakukan penelitian, memberikan gambaran secara jelas terhadap kondisi atau permasalahan yang dihadapi dalam proses pembangunan infrastruktur di desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, kemudian menguraikan dan membandingkan kenyataan yang ada kemudian menarik kesimpulan.

C. Informan

Dalam penelitian ini informan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu cara pengambilan sampel dengan pertimbangan informasi atau pengambilan data informan yang memiliki pengetahuan luas dan yang mampu menjelaskan sebenarnya tentang objek yang diteliti. Informan adalah orang yang memberi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian (narasumber). Informan juga berarti sebagai orang yang diwawancarai, dimintai informasi atau berita oleh peneliti dan diperkirakan orang yang menjadi informan ini bisa menguasai serta memahami data, informasi, ataupun kejadian yang betul-betul terjadi dari objek penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kewenangan dan keilmuan yang terkait dengan penelitian, diantaranya:

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1	Syahrir	1	Kepala Desa
2	Afdal, S. Pd	1	Sekretaris desa
3	Muhammad Saleh K, S.Pd	1	Ketua BPD
4	Halqi, S.Ag	1	Wakil ketua BPD
5	Takdir	1	Tokoh masyarakat
6	Nur Amin, S.Pd	1	Tokoh masyarakat
7	Muh Ikhsan Rompa, S.Ip	1	Tokoh pemuda
8	Page	1	Masyarakat

Tabel 3.1 Informan Penelitian

D. Teknik pengumpulan data

Teknik dalam pengumpulan dalam penelitian ini adalah hal yang paling utama dalam penelitian ini yang bertujuan dalam penelitian adalah untuk mendapatkan hasil wawancara ataupun data. Menurut Sugiyono (2007: 209) teknik pengumpulan data dalam penyusunan menggunakan penyusunan proposal dengan cara observasi dan wawancara.

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan atau kunjungan langsung ke lapangan dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan suatu informasi yang lebih detail dan akurat, agar dapat mengetahui dan menganalisis berbagai masalah yang ada yang berkaitan dengan penerapan prinsip partisipasi dan responsibilitas, adapun yang diperoleh dari hasil observasi adalah tempat, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian dan perasaan.

2. Wawancara

Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara adalah melakukan pengumpulan data atau informasi dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber atau berhadapan langsung (tatap muka) untuk mendapatkan suatu informasi secara lisan dengan tujuan untuk mendapatkan kejelasan dari masalah penelitian, atau percakapan dua orang atau lebih dengan cara tanya jawab secara langsung untuk bertukar ide ataupun informasi yang dapat dikonstruksikan dalam suatu topik menurut Esterberg dalam sugiyono (2007: 211). Dengan begitu peneliti dapat mengetahui hal-hal yang sebelumnya belum didapatkan dalam observasi.

3. Studi dokumentasi

Dalam hal ini merupakan kumpulan dokumen yang dianggap penting dan dapat menunjang permasalahan yang akan diteliti. Menurut (Sugiyono 2015:329) dokumentasi adalah memperoleh data serta informasi dalam bentuk buku arsip, dokumen serta tulisan angka, gambar berupa laporan dan keterangan yang mendukung untuk peneliti.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses dalam mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi, dengan cara mengelompokkan suatu data dalam bentuk kategori, kemudian dijabarkan dalam unit-unit yang dapat dipilih yang mana lebih penting dan sudah dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun untuk orang lain.

Dalam menganalisis data peneliti mengacu pada beberapa tahap diantaranya:

1. Pengumpulan data melalui wawancara

Aktivitas mencari data yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan penelitian seperti analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan penelitian atau wawancara yang dilakukan terhadap sumber informasi yang dapat memberikan suatu informasi yang akurat terhadap studi kasus penelitian.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah bagian dari analisis, atau suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Banyaknya jumlah data yang di peroleh dari data lapangan mengharuskan peneliti untuk mencatat lebih detail dan terperinci untuk mendapatkan data yang lebih detail memerlukan reduksi data.

3. Uji *confirmability*

Adapun arti dari *confirmability* yaitu menguji atau membenarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan, dan apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan maka dari itu penelitian tersebut telah masuk standar *confirmability*.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan suatu rangkaian organisasi dari suatu kegiatan yang berwujud utuh, kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan teliti dengan mencari arti pola-pola penjelasan sehingga dilakukan dengan teliti dan cermat dengan melakukan beberapa tinjauan ulang pada catatan lapangan data-data yang diperoleh secara akurat.

F. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah salah satu faktor yang penting bahwa semua yang telah diamati peneliti sesuai (relevan) dengan data dan memang benar-benar terjadi, maka dari itu peneliti memelihara dan menjamin bahwa data tersebut benar, baik bagi pembaca maupun subyek penelitian. Dalam pengabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi yaitu pengecekan dari beberapa sumber dengan berbagai cara dan waktu.

1. Triangulasi sumber

Membandingkan dengan cara mengecek ulang informasi yang didapatkan dari informan satu ke informan dua dan seterusnya, misalnya pertanyaan yang diajukan ke informan satu kemudian dipertanyakan kembali kepada informan kedua untuk membandingkan atau memperjelas kembali informasi yang didapatkan apakah sesuai atau tidak untuk mendapatkan informasi yang benar-benar akurat.

2. Triangulasi teknik

Untuk menguji integritas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Seperti, data diperoleh dengan wawancara kemudian dicek dengan observasi atau kuesioner. Apabila dengan teknik pengujian kreadibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti harus melakukan pembicaraan lebih lanjut untuk sumber yang bersangkutan atau yang lain yang dapat memberikan informasi terkait dengan pertanyaan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk mendapatkan suatu data yang diperoleh dari observasi sehingga untuk pengamatan tidak dilakukan dalam satu kali saja.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Profil Kabupaten Barru

Kabupaten Barru dahulu sebelum terbentuk adalah sebuah kerajaan kecil yang masing-masing dipimpin oleh seorang Raja yaitu : kerajaan Berru (Barru) kerajaan Tanete, kerajaan Soppeng Riaja dan kerajaan Mallusetasi. Seiring dengan berjalannya waktu, maka pada tanggal 24 februari 1960 merupakan tonggak sejarah yang menandai awal mula kelahiran Kabupaten Daerah TK. II Barru dengan ibu Kota Barru, berdasar dalam Undang-Undang Nomor 229 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi Selatan, Kabupaten Barru terbagi dalam 7 Kecamatan dan 55 Desa/ Kelurahan.

Kabupaten Barru terletak di pantai Barat Sulawesi Selatan, berjarak sekitar 100 km arah Kota Makassar. Secara geografis terletak pada koordinat 4 Secara astronomis, Kabupaten Barru terletak diantara $4^{\circ}05'49''$ LS - $4^{\circ}47'35''$ LS dan $119^{\circ}35'00''$ BT - $119^{\circ}49'16''$ BT. Secara astronomis, Kabupaten Barru terletak diantara $4^{\circ}05'49''$ LS $4^{\circ}47'35''$ LS dan $119^{\circ}35'00''$ BT - $119^{\circ}49'16''$ BT.

Luas wilayah kabupaten Barru seluas 1.174,72 km² yang terbagi dalam 7 Kecamatan yaitu ; Kecamatan Tanete Riaja seluas 174,29 km², Kecamatan Tante Rilau seluas 79,17 km², Kecamatan Barru seluas 199,29 km², Kecamatan Pujananting seluas 78,90 km², Kecamatan Soppeng Riaja seluas 78,90 km², Kecaamatan Mallusetasi seluas 216,58 km², Kectan Pujananting seluas 314,26 km², dan Kecamatan Balusu seluas 112,20 km².

Kabupaten Barru terdiri dari 7 Kecamatan dan 55 Desa/ Kelurahan, yaitu:

- a) Tanete Riaja : Mattirowalie, Harapan, Lompo Riaja, Libureng, Kading, Lompo Tengah, dan Lempang.
- b) Tanete Rilau : Lasitae, Pancana, Lalabata, Corowali, Pao-pao, Tellumpanua, Lalolang, Tanete, Lipukasi, dan Garessi.
- c) Barru : Sumpang Binangae, Coppo, Tuwung, Anabanua, Palakka, Galung, Tompo, Sepee, Mangempang, dan Slawung.
- d) Soppeng Riaja : Ajakkang, Paccekke, Kiru-kiru, Mangkoso, Lawallu, Siddo, dan Batupute.
- e) Mallusetasi : Cilellang, Manuba, Nepo, Palanro, Mallawa, Kupa, Bojo dan Bojo Baru.
- f) Pujananting : Bulu-bulu, Gattareng, Pujananting, Jangan-jangan, Pattappa, Bacu-bacu dan Mattappawalie.
- g) Balusu : Binuang, Madello, Takkalasi, Kamiri, Balusu, dan Lampoko

Tabel 4.1 Wilayah Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1.	Tanete Riaja	22.739 orang
2.	Tanete Rilau	33.773 orang
3.	Barru	41.078 orang
4.	Soppeng Riaja	17.899 orang
5.	Mallusetasi	25.549 orang
6.	Pujananting	13.100 orang
7.	Balusu	18.629 orang
	Jumlah	172.767 orang

Wilayah 7 Kecamatan yang terbentuk di dalamnya terdapat wilayah-wilayah yang lebih kecil, yaitu 15 wilayah yang berstatus kelurahan dan 40 wilayah berstatus Desa. Jadi secara keseluruhan, wilayah Kabupaten Barru/ Kelurahan masing-masing wilayah Kecamatan tersebut yang mempunyai potensi sumber daya manusia yang berbeda meskipun perbedaan itu relative kecil, sehingga untuk pemanfaatan sumber-sumber yang ada relative sama untuk menunjang pertumbuhan pembangunan di wilayahnya. Berikut disajikan jumlah Desa dan kelurahan setiap Kecamatan di Kabupaten dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Desa dan Keseluruhan

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
1.	Tanete Riaja	6	1	7
2.	Tanete Rilau	8	2	10
3.	Barru	5	5	10
4.	Soppeng Riaja	5	2	7
5.	Mallusetasi	5	3	8
6.	Pujananting	6	1	7
7.	Balusu	5	1	6
	Jumlah	40	15	55

Penduduk Kabupaten Barru berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 172.767 jiwa yang terdiri atas 83.082 jiwa penduduk laki-laki dan 89.685 jiwa penduduk perempuan, dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Barru mengalami pertumbuhan sebesar 0,5 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 0,5 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 0,56 persen dan penduduk perempuan sebesar 0,45 persen. Sementara itu besarnya angka resiko jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 92,24. Kepadatan penduduk di Kabupaten Barru tahun 2017 mencapai 147 jiwa/ km² dengan rata-rata jumlah penduduk perumah tangga 4 orang. Kepadatan penduduk di 7 Kecamatan Tanete Rilau dengan

kepadatan sebesar 476 jiwa/km2, sementara itu jumlah rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 0,5 persen dari tahun 2016.

Tabel berikut menggambarkan jumlah penduduk setiap Kecamatan di Kabupaten Barru:

Tabel 4.3 jumlah penduduk setiap kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1.	Tanete Riaja	22.739 orang
2.	Tanete Rilau	33.773 orang
3.	Barru	41.078 orang
4.	Soppeng Riaja	17.899 orang
5.	Mallusetasi	25.549 orang
6.	Pujananting	13.100 orang
7.	Balusu	18.629 orang
	Jumlah	172.767 orang

Visi dan misi pemerintahan Kabupaten Barru

VISI:

Terwujudnya Kabupaten Barru lebih maju, sejahtera, taat azas dan bermanfaat yang bernafaskan keagamaan.

MISI:

Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, meningkatkan interkoneksi sinergis antar wilayah ditingkat nasional, regional dan internasional, menicapkan

lingkungan yang kondusif, mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*)

2. Profil Kecamatan Pujananting

Kecamatan adalah wilayah administrative yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten atau Kota, Kecamatan sendiri dipimpin oleh camat yang masing-masing merupakan pegawai negeri sipil serta bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota yang melingkupi batas-batas wilayahnya, setiap Kecamatan terdiri dari beberapa Kelurahan/ Desa atau nama lain.

tabel berikut menggambarkan luas wilayah Desa/ Kelurahan di Kecamatan Pujananting.

Tabel 4.4 luas wilayah Desa/ Kelurahan

No.	Desa/Kelurahan	Luas (KM2)	Persentase
1.	Bulo-Bulo	37,08	3,16
2.	Gattareng	49,60	4,22
3.	Pujananting	77,88	6,63
4.	Jangan-Jangan	40,75	3,47
5.	Pattappa	41,50	3,53
6.	Bacu –Bacu	30,00	2,64
7.	Mattappawalie	36,45	3,10
Jumlah/Total		314,45	26,75

Tabel berikut menggambarkan posisi dan tinggi wilayah diatas permukaan laut (DPL) Kantor Desa/ Kelurahan di Kecamatan Pujananting.

Luas Desa, jarak (KM), dan ketinggian dari permukaan air laut di Pujananting tahun 2018

Tabel 4.5 luas Desa, jarak (KM), dan ketinggian dari permukaan air laut di

Pujananting tahun 2018

No.	Desa/ Kelurahan	Luas Area(Km2)	Ibu kota kecamatan	Ibu kota kabupaten	Ketinggian dari permukaan laut (DPL)
1.	Bulo-Bulo	37,03	38,00	68,00	600,00
2.	Gattareng	49,60	39,00	69,00	700,00
3.	Pujananting	77,88	24,00	56,00	400,00
4.	Jangan-Jangan	40,75	2,00	34,00	400,00
5.	Pattappa	40,50	0,10	32,00	300,00
6.	Bacu-Bacu	31,00	9,00	41,00	500,00
7.	Mattappa-walie	36,45	0,10	32,00	300,00
	Kec.Pujananting	313,26			

Tabel berikut menggambarkan jumlah penduduk Desa/Kelurahan di Kecamatan Pujananting.

Tabel 4.6 Banyaknya penduduk kecamatan pujananting, 2018

No.	Desa/Kelurahan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Bulo-Bulo	2242	2249	2254	2260	2266
2.	Gattareng	2135	2142	2146	2152	2157
3.	Pujananting	2886	2892	2897	2904	2913
4.	Jangan-Jangan	1555	1560	1562	1567	1571
5.	Pattappa	1128	1132	1134	1137	1139
6.	Bacu-Bacu	1587	1593	1595	1600	1604
7.	Mattappawalie	1469	1474	1476	1480	1485
	Jumlah :	13.002	13.042	13.064	13.100	13.135

3. Profil Desa Gattareng

Gambaran umum Desa Gattareng adalah usaha menggambarkan secara utuh tentang kondisi Desa. Data-data yang disusun diambil dari semua data yang tersedia dan bisa didapatkan, selain menggunakan data-data yang ada gambaran umum desa ini, diperkaya data-data didapat dari hasil survey pemetaan sosial, wawancara, forum grup diskusi dengan menggunakan metode, CLAPP-GSI, maupun pengamatan secara langsung merupakan bagian dari tahapan participatory Rural Appraisal (PRA) dan Rapid Rural Appraisal (RRA).

Data yang dipakai untuk menggambarkan situasi atau keadaan kependudukan misalnya dalam gambaran umum memakai data hasil survey serta melalui sensus peningkatan kesejahteraan masyarakat (PKM), dalam bentuk indept interview dan forum grup diskusi (FGD) kepada masyarakat umum. Hasil data ini memunculkan perbedaan dengan data yang ada di gattareng. Setelah ditelusuri dan dicek ulang data yang ada di desa adalah data yang disusun dari data hasil sensus penduduk, sedangkan hasil sekunder ini dilakukan pada bulan November 2010, sehingga pada penyusunan dokumen desa Gattareng ini, memakai data yang aktual yang didapat dari hasil pendapatan survey di lapangan.

a. Sejarah Desa Gattareng

Konon seorang Putri Raja Gowa ingin dipersunting oleh tiga pemuda yang tak lain adalah sepupunya sendiri dan ketiga pemuda tersebut tidak ada yang mau mengalah, untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah maka putri raja bersama dayang-dayangnya meninggalkan kerajaan Gowa menuju ke utara, disetiap jalan yang dilaluinya ditanam sebuah pohon lontar sebagai arah jalan yang dilewatnya hingga pada pohon lontar terakhir.

Akhirnya putri raja sampai pada tempat yang dipilihnya untuk menetap yaitu sebuah hutan behawa sejuk dikelilingi pepohonan yang lebat dan tanah yang subur yang keudian diberi nama Mangempang (saat ini berada di dusun Benrong) sebagai nama salah satu perkampungan daerah asalnya dan putri raja tersebut akhirnya di beri nama (Buah Tallitta'na Gowa).

Suatu ketika putra Raja Bone bersama pengawalnya berburu rusa menelusuri hutan belantara bagian selatan kerajaanya dalam perburuan, seekor anjing milik putra raja memisahkan diri dari tuannya menemukan sebuah rumah ditengah hutan yang dihuni oleh seorang gadis cantik yang lain putri raja Gowa, singkat cerita putra raja pun jatuh hati dengan keramahan dan kecantikan penghuni rumah itu yang akhirnya menikahi wanita itu. Seiring berjalannya waktu wilayah itu tersu berkembang dan jarena letaknya yang berada pada ketinggian maka wilayah tersebut diberi nama Gattareng.

Dalam sejarah pemerintahan desa Gattareng dahulunya adalah sebuah kerajaan dalam wilayah kerajaan Tanete, dimana pertama kali dipimpin oleh seorang raja yang pada saat itu tak satupun orang berani menyebutkan namanya, masyarakat percaya bahwa orang yang menyebut namanya akan sakit. Semasa pemerintahan tersebut seorang saudagar berketurunan Arab bernama Syekh Muhammad Saleh masuk ke desa Gattareng dan menyebarkan agama Islam dimana pada saat itu raja Gattareng masuk Islam dan diikuti oleh seluruh keluarga kerajaan, setelah dua hari memeluk agama Islam beliau (raja Gattareng) meninggal dunia, maka beliau diberi gelar Petta Matinroe Riteppe'na.

Petta Matinroe Riteppe'na memiliki dua orang anak yaitu Andi Kajompi dan Andi Mapeabang. Setelah Petta Matinroe Riteppe'na wafat kepemimpinan di desa Gattareng kemudia dipimpin oleh anaknya yang bernama Andi Mapeabang dengan sebutan Petta Gattareng I, kemudian A.

Upe yang bergelar Petta Gattareng II yang merupakan putra dari Andi Mappabang sekaligus menjadi raja terakhir

Sistem pemerintahan selanjutnya berganti dari kerajaan menjadi pemerintahan Sullewatang yang dipimpin oleh A. Palla Kadere dengan sebutan Petta Sulle yang kemudian sistem pemerintahan berubah menjadi sistem pemerintahan kembali berubah distrik yang dipimpin oleh A. Ahmad Surya yang bergelar KDT (Kepala Distrik Toritorial) yang membawahi beberapa desa.

Sejak pembentukan desa Gattareng tahun 1964 hingga saat ini telah dipimpin oleh beberapa orang yakni:

- 1) Andi Massarapping P. Tekko (1955-1960)
- 2) Puang Habba (1960-1964)
- 3) Andi Tenri Peppang Petta Biccui (1964-1967)
- 4) Andi Lalif Upe (1967-1983)
- 5) Muhammad (1983-1993)
- 6) Andi Kalim Atpas (1993-2001)
- 7) Chaliq Piagam/ Pjs. Desa Gattareng (2001-2003)
- 8) A. Mustari. B (2003-2007)
- 9) Chaliq Piagam/ Pjs. Desa Gattareng (2008-2009)
- 10) Syahrir (2009-2016)
- 11) Sultan, SE (Pj. Kep. Desa 2016-2017)
- 12) Syahrir (2017-2023)

b. Demografis

Desa gattareng secara geografis berada di ketinggian antara 800 dpl (diatas permukaan laut). Dengan keadaan curah hujan rata-rata dalam setahun antara 150-180 hari, serta suhu rata-rata setahun adalah 25 s/d 35 C. Secara administrasi desa Gattareng terletak di wilayah Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru. Wilayah desa Gattareng secara administrasi dibatasi oleh wilayah Kabupaten dan Kecamatan desa tetangga.

c. demografi/ batas Desa

- 1) Sebelah utara: berbatasan dengan Desa Batu Putih Bone
- 2) Sebelah selatan: berbatasan dengan Desa Bulu-Bulu Barru
- 3) Sebelah timur: berbatasan dengan Desa Samaenre Bone
- 4) Sebelah barat: berbatasan dengan Desa Pujananting Barru

a. jarak dari ibu kota Kecamatan 41 km

1. Dari ibu kota Kabupaten 60 km
2. Dari ibu kota provinsi 120 km

b. luas wilayah desa dalam tata guna lahan

luas wilyah Gattareng 3.360 Ha terdiri dari

1. Permukiman : 200 ha
2. Perswahan : 450 ha
3. Perkebunan: 425 ha
4. Kuburan : 20 ha
5. Perkantoran : 1 ha
6. Prasarana umum lainnya : 2.264 ha

Di desa Gattareng secara umum kondisi tanahnya sangat subur dan gembur semua jenis tanaman bisa tumbuh dengan baik.

d. Demografis kependudukan

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa Gattareng tahun 2020 jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 2.312 jiwa. Dengan perincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.021 jiwa. Sedangkan berjenis kelamin perempuan 1.196 jiwa.

Tabel 4.7 jumlah penduduk desa Gattareng berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.116
2.	Perempuan	1.996
	Total	2.312

e. keadaan sosial

Perspektif desa Gattareng kental dengan budaya khas Gattareng, yaitu budaya sipakatau, sipakalebbi, yang artinya saling menghargai dan tetap menjaga sifat kesosialan anatar sesama. Dari latar belakang budaya, kita bisa melihat aspek budaya dan sosial yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Didalam hubungannya dengan agama yang dianut mislanya maupun upacara adat lainnya, Islam sebagai agama mayoritas dianut oleh desa Gattareng, dalam menjalankan sangat kental tradisi budaya khas Gattareng.

f. keadaan ekonomi

Secara umum mata pencaharian masyarakat desa Gattareng dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian seperti petani, wiraswasta, PNS sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Desa Gattareng memiliki beberapa potensi untuk dikembangkan antara lain Gattareng memiliki tempat wisata yang bernama kelo dan bertingkat tujuh yang terletak di dusun Lempang desa Gattareng. Desa ini juga memiliki budaya tari sere api (mappadendang) yang terletak di dusun Lempang desa Gattareng.

Tabel 4.8 jumlah penduduk menurut mata pencaharian desa Gattareng tahun 2020

No.	Mata pencaharian	Jumlah
1.	Petani	20
2.	Pegawai Negeri Sipil	610
3.	Tukang Kayu	6
4.	Wiraswasta	22
5.	Tidak mempunyai pekerjaan tetap	69
6.	Purnawirawan/ pension	3
7.	Perangkat Desa	14
8.	Sopir	14
9.	Tukang rias	2
10.	Karyawan honorer	26
11.	Tukang las	8
Jumlah		794

1. Pertanian

Hasil pertanian masyarakat desa Gattareng berupa padi masih diproduksi dalam skala kecil dimana pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa saja

2. Peternakan

Hasil peternakan berupa sapi potong dan unggas biasanya diijual melalui tengkulak namun ada juga yang menjualnya secara langsung guna kepentingan acara keagamaan maupun adat.

3. Perkebunan

Adapun hasil perkebunan desa Gattareng yakni kacang tanah, jagung, umbi-umbian dan sayur-sayuran. Sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun sebagian lagi dijual kepasar-pasar tradisional atau pasar desa.

4. Usaha mikro

Di desa Gattareng juga terdapat usaha mikro seperti kios-kios yang melayani kebutuhan masyarakat desa Gattareng dan sekitarnya namun sifatnya masih sangat terbatas dan sederhana, ini dikarenakan oleh keterbatasan modal usaha.

g. kondisi pemerintahan Desa

Desa Gattareng dipimpin oleh kepala desa yang merupakan hasil pemilihan langsung oleh masyarakat desa Gattareng. Dalam menjalankannya pemerintahan kepala desa dibantu oleh sekretaris desa para kaur serta staf desa,

selain itu juga terdapat lembaga pengawas yang berfungsi sebagai pengawas jalannya pemerintahan.

Tabel 4.9 pejabat pemerintahan desa Gattareng tahun 2020

No.	Nama	Jabatan
1.	Syahrir	Kepala Desa
2.	Afdal, S. Pd	Sekretaris Desa
3.	Aridha	Kasi pemerintahan
4.	Mariana, S. Sos	Kaur keuangan
5.	Fitri Bakhtiar, S. Pd	Kaur umum dan perencanaan
6.	Al Ashar	Kasi kesra
7.	Hasmia	Staf desa
8.	Rika Santy	Staf desa
9.	Chalik Piagam	Staf desa
10.	Herdiansyah	Staf desa
11.	Jumrah Nasri	Staf desa
12.	Ismail	Staf desa
13.	M. Tahir	Staf desa lainnya

Table 4.10 Nama-nama pengurus badan permusyawaratan desa Gattareng

No	Nama	Jabatan
1.	Muhammad Saleh, S. Pd	Ketua
2.	Halqi, S. Ag	Wakil ketua
3.	M. Said. H	Sekretaris
4.	Abd. Galib	Anggota
5.	Jumrah. M	Anggota

Struktur kepemimpinan desa Gattareng tidak lepas dari struktur administrasi pemerintahan pada level di atasnya.

1) Pembagian wilayah Desa

Secara administrasi desa Gattareng terletak di wilayah kecamatan Pujananting Kabupaten Barru yang terdiri dari 6 dusun/15 RT, yaitu:

a. Dusun Patallassang

Kadus : Misram, S.Pd

RT 1 : Saharuddin

RT 2 : Lukman

RT 3 : Amiruddin

b. Dusun Manyego

Kadus : Jumasse

RT 1 : Mallah. M

RT 2 : Abd. Haling

RT 3 : Abd. Asis

c. Dusun Lempang

Kadus : Masse

RT 1 : Page

RT 2 : Roje

RT 3 : Cammo

d. Dusun Pising

Kadus : Buhari

RT 1 : Umrah. U

RT 2 : Siratang

e. Dusun Benrong

Kadus : A. Bantiar

RT 1 : Latta

RT 2 : Heruddin. D

f. Dusun Bungaejae

Kadus : Renta

RT 1 : La Jaji

RT 2 : Yamang

2) Visi Misi Desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru

VISI :

Terciptanya pemerintahan desa untuk mendukung peningkatan pembangunan secara demokratis, partisipasi, akuntabilitas dan

transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang bernafaskan keagamaan agar terbentuk desa maju dan mandiri.

Penjelasan visi:

- a) Kuat, terciptanya kerjasama yang baik dengan BPD dan masyarakat desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban
- b) Demokratis, yaitu pembangunan dalam desa Gattareng mampu menciptakan suasana yang adil dan senantiasa memperhatikan hak-hak masyarakat di desa.
- c) Partisipasi, yaitu masyarakat dengan ikhlas ikut melaksanakan pembangunan sedangkan pemerintah desa menghargai dan mendukung keterlibatan masyarakat.
- d) Akuntabilitas, yaitu pengelolaan pembangunan dan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan dihadapan masyarakat desa
- e) Transparansi, yaitu ketebukaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam pengelolaan pemerintah desa menjadi prioritas

BERNAFASKAN KEAGAMAAN

Pembangunan desa Gattareng berdasarkan pada dasar agama, adat istiadat dan norma yang berlaku di masyarakat.

MISI :

Pernyataan misi membawa desa kepada suatu fokus. Misi inilah yang harus dikembangkan oleh pemerintahan desa untuk mewujudkan visi desa tersebut diatas, maka pemerintahan desa Gattareng menetapkan misi sebagai berikut:

a) Misi bidang pelayanan

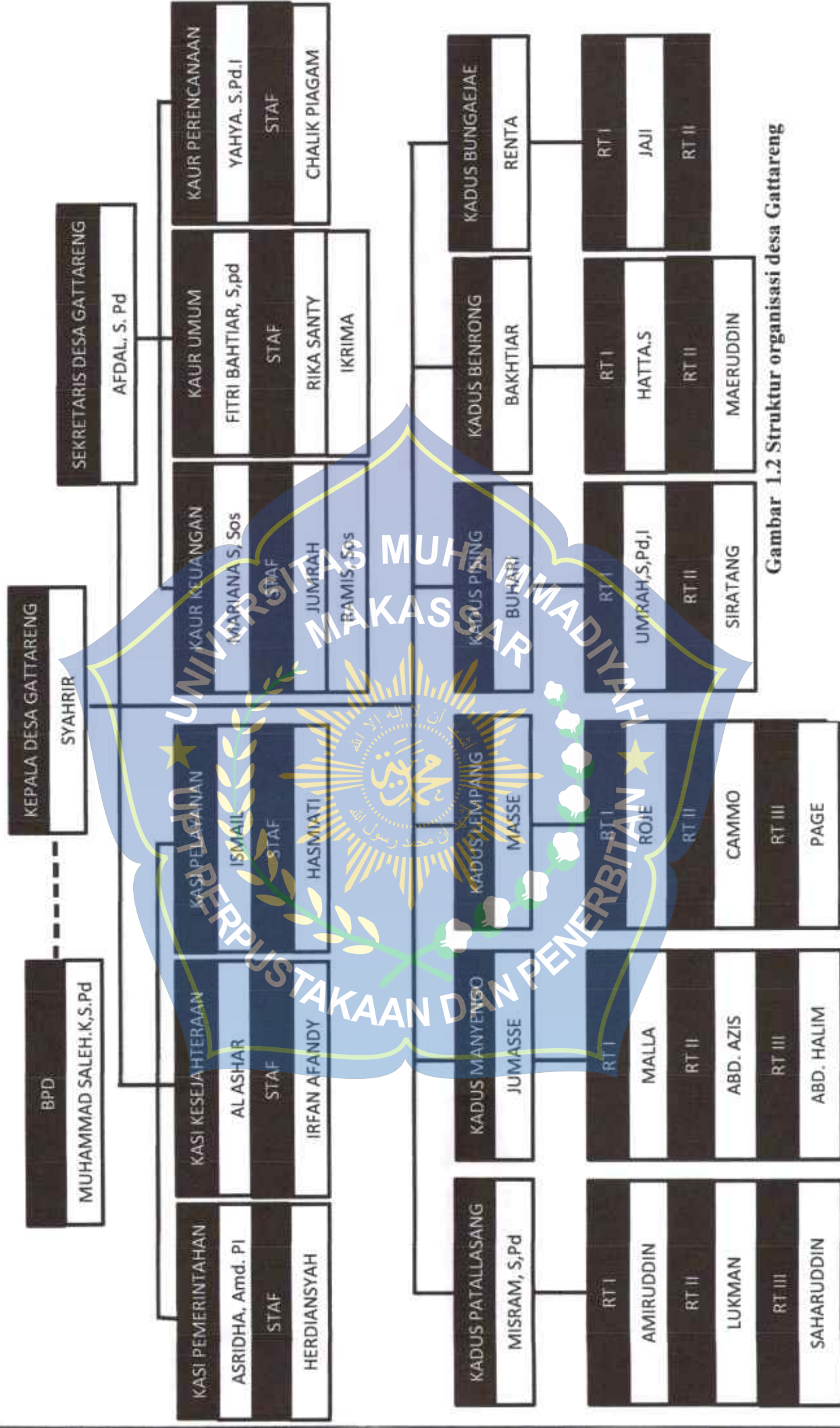
1. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang efisien, demokratis, adil dan merata.
2. Memantapkan administrasi kependudukan dan data keluarga miskin.
3. Meningkatkan kualitas aparatur desa dan masyarakat melalui pelatihan-peatihan

b) Misi pembangunan

Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi obyektif yang dimiliki desa Gattareng, dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan masyarakat melalui infrastruktur desa
2. Sumber daya unggulan yang menjadi basis ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat desa Gattareng
3. Partisipatif pelibatan peran serta masyarakat dalam pembangunan yaitu dalam mengidentifikasi berbagai masalah pembangunan, kebutuhan pembangunan, penyusunan rencana program, imprealis dan pengawasan
4. Pemberdayaan masyarakat memberdayakan seluruh potensi SDA, SDM, sumber daya modal dan teknologi.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA GATTARENG



Gambar 1.2 Struktur organisasi desa Gattareng

3) Kelembagaan Desa

Lembaga-lembaga pemerintahan desa, pemerintahan desa, diselenggarakan oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dan bagaimanakah keduanya lembaga tersebut menyelenggarakan pemerintah desa.

4) Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa

a) Kepala Desa

Sebuah Desa dipimpin oleh kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sebuah pemilihan kepala Desa (pilkades). Masa jabatan adalah 5 tahun, sedangkan seorang lurah biasanya berstatus pegawai Negeri, sedangkan kepala Desa tidak. Untuk mencapai kebutuhan hidupnya, kepala Desa diberi tanah Desa yang biasa disebut tanah carik atau tanah bengkok, kepala Desa bisa menggarap tanah tersebut selama ia menjabat sebagai kepala Desa juga menerima gaji dari pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa, setiap tahun, kepala desa juga menyampaikan laporan kepada Bupati, sebab bupatilah berwenang mengangkat dan memberhentikan kepala desa.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan, karena tugasnya tersebut kepala desa memiliki wewenang, yaitu

1. Menyusun dan mengajukan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPB Desa) kepada BPD.
2. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
3. Mengajukan rancangan peraturan desa
4. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa

b) Perangkat Desa

Dalam menyelenggarakan pemerintah desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa lainnya, adalah secretariat desa, pelaksana teknis, serta unsur kewilayahan. Bagi kepala desa, perangkat desa seperti menteri bagi presiden, perangkat desa membantu tugas-tugas kepala desa untuk melayani warga desa, perangkat desa berasal dari desa setempat, mereka diangkat oleh kepala desa. Namun ada juga perangkat desa yang ditunjuk oleh pemerintah. Di beberapa tempat, ada pula perangkat desa yang dipilih langsung oleh warga desa. Perangkat-perangkat desa dan tugas-tugasnya sebagai berikut:

1. Unsur staf

Perangkat desa dari unsur staf terdiri dari sekretaris desa dan kaur, dalam pemerintahan desa, sekretaris desa membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris desa di bantu oleh kepala urusan atau disebu

kaur. Kaur bertugas melayani warga desa dalam berbagai urusan. Paling banyak ada enam urusan yang ditangani oleh kaur.

Pada kaur tersebut terdiri dari kepala urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan rakyat, dan keagamaan, umum, perekonomian, dan keuangan. Diantara tugas-tugas mereka adalah sebagai berikut:

- a) bersama-sama kepala desa dan sekretaris desa menjalankan pemerintahan desa.
- b) Merumuskan dan melaksanakan program pembangunan desa dan kemasyarakatan.
- c) Melayani masyarakat di setiap bidang.

2. Unsur pelaksanaan

Unsur pelaksanaan teknis lapangan seperti urusan pamong tani desa dan urusan keamanan atau hansip yang bertugas menjaga keamanan desa.

3. Unsur kewilayaan

Unsur kewilayaan berfungsi membantu kepala desa dalam bidang pemerintahan. Bidang tugas unsur kewilayaan mempunyai nama yang berbeda. Di daerah pedesaan, unsur kewilayaan diwujudkan dalam bentuk dusun. Dusun terbeuntuk dari kumpulan beberapa Rukun Warga (RW) yang berdekatan. Setiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun, kepala dusun membantu jalannya

pemerintahan desa di tingkat dusun. Di antaratugas kepala dusun adalah:

- a) Membantu kepala desa dalam bidang administrasi
- b) Menjalankan sebagian tugas kepala desa yang dilimpahkan pada kepala desa
- c) Membina kehidupan masyarakat dusun.

4. Badan permusyawaratan desa

Anggota BPD dipilih oleh warga desa dengan cara musyawarah dan mufakat. anggota BPD dipilih dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, maupun pemangku adat sebagaimana kepala desa, BPD memiliki masa jabatan selama enam tahun, setelah itu dapat dipilih sekali lagi. Keanggotaan BPD ditetapkan berdasarkan keputusan bupati atau wali kota. Tugas BPD adalah mengawasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dalam menjalankan tugasnya. BPD berwenang menggunakan hal berikut:

- a) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- b) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- c) Mengawasi pelaksanaan peraturan desa
- d) Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f) Menyusun tata tertib BPD
- g) Mengayomi adat-istiadat

- h) Menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa bersama dengan kepala desa
- i) Melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa

5. Lembaga kemasyarakatan

Selain pemerintahan desa BPD ada lembaga lain yang juga berperan penting dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, lembaga tersebut adalah lembaga kemasyarakatan. Lembaga non pemerintah ini dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan antara lain:

a) LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Lembaga ini berkedudukan ditingkat desa yang berperan dalam rangka ikut memperlancar suatu program-program bangunan di tingkat desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/ LPMK) lembaga ketahanan masyarakat desa atau kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebuah nama lain mempunyai tugas menyusun rancangan pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan (LKMD/ LPMK) lembaga ketahanan masyarakat desa atau kelurahan (LKMD/ LKMK) atau sebutan nama lain dengan melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan
 2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
 4. Menyusun rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
 5. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat, dan
 6. Menggali pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.
- b) Tim penggerak PKK
- Tim penggerak PKK Desa/ Kelurahan mempunyai tugas membantu pemerintahan/ lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Tugas penggerak kerja atau kelurahan meliputi:

1. Menyusun rencana kerja PKK Desa/ Kelurahan, sesuai dengan hasil rekarda Kabupaten.
2. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati

3. Menyuluh dan menggerakkan kelompok PKK dusun atau lingkungan RT, RW dan desa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah di susun dan disepakati.
4. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
5. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera.
6. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja.
7. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/ kelurahan.
8. Membuat laporan hasil kegiatan kepada tim penggerak PKK kecamatan dengan tembusan kepada ketua Dewan penyantun Tim Penggerak PKK setempat.
9. Melaksanakan tertip administrasi.
10. Mengadakan konsultasi dengan ketua dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat. Tim penggerak PKK/ Desa/ Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi: Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK dan fasilitator,

perencanaan, pelaksanaan, pengendali, Pembina dan pembimbing penggerak PKK.

c) RT dan RW

RT dan RW mempunyai tugas membantu pemerintahan desa dan lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. RT dan RW dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

1. Pendapatan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.
2. Pemilihan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.
3. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat di wilayahnya.
4. Penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

d) GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani)

Merupakan wadah bagi kelompok tani di tingkat desa, kegiatan yang menjadi rutinitas adalah pertemuan kelompok tani tingkat desa yang dilaksanakan secara bergilir setiap bulan di masing-masing kelompok tani kegiatan yang dilakukan;

1. Pendampingan program aksi mandiri pangan
2. Pengelolaan PUAP (Program Usaha Agrobisnis Perdesaan)

e) Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)

Posyandu terdiri dari dua yaitu posyandu balita dan posyandu lansia, pemberian makanan tambahan bagi balita dan lansia, penyuluhan kesehatan bagi balita dan lansia.

5) kebijakan pembangunan

Dengan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten Barru Nomor 4 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah kabupaten Barru 2011-2015 dan juga didukung oleh kelembagaan desa yang kuat serta pelaku-pelaku pembangunan di tingkat desa, maka dari itu diharapkan secara bertahap dalam permasalahan yang ada di desa Gattareng sehingga dapat terpecahkan dan adanya sinkronisasi dengan agenda pembangunan serta rencana pembangunan, sehingga dapat terwujud desa Gattareng sesuai dengan apa yang diharapkan dan apa yang diinginkan.

Arah kebijakan pembangunan desa Gattareng diterapkan sebagai berikut:
memperkuat kelembagaan desa

- a. Reorganisasi kepengurusan kelembagaan desa yang ada
- b. Periodisasi kepengurusan kelembagaan desa yang ada
- c. Penempatan personil sesuai dengan keahlian
- d. Penjelasan tugas pokok dan fungsi kelembagaan desa
- e. Penyusunan rencana program kerja kelembagaan desa Menyelenggarakan

6) Permasalahan desa

Berbagai permasalahan di desa Gattareng secara umum kurangnya seputar pembangunan sarana prasarana dalam bentuk fisisiik tekhusus di isnfarstruktur jalan hingga sarana transportasi keluar daerah masih susah. Permasalahn di desa merupakan hal yang akan dicapai melalui pembangunan jangka menengah yang dijabarkandalam rencana pembangunan tahunan secra bertahap dengan skala prioritas yang mendesak dianatarnya sebagai berikut:

- a. Tidak memadainya sarana alses jalan, umumnya jalan di desa Gattareng masih bebatuan atau belum di aspal serta belum ada jalan usaha tani yang memadai.
- b. Sulitnya pengangkutan hasil pane pertanian keluar daerah dikarenakan infrastruktur jalan masih susah bahkan tidak bisa dilalui kendaraan di musim penghujan.
- c. Irigasi tehnis yang tidal memadai sehingga aiar irigasi dipersawahan tidak teratur, bahlan banyak lahan yang tidak dikerja pada musim kemarau.
- d. Belum maksimalnya peran serta fungsi kelembagaan yang ada, baik ditingkat desa maupun ditingkat dusun.
- e. BUMDES dan KUD belum berperan secara maksimal

B. HASIL PENELITIAN

Dalam undang-undang No 6 tahun 2014 dimana kepala desa memiliki peran penting serta tugas antara lain untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, yang dimana melaksanakan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa sangat berpengaruh dalam hal pembangunan terhadap segala macam aktivitas pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat, pemerintah desa sangat berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan tanggung jawab karena pemerintah desa adalah seorang pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat dan dipilih oleh masyarakat itu sendiri.

1. penerapan prinsip partisipasi dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Gattareng

Dalam hal ini terkait dengan penerapan prinsip partisipasi sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang yang pada dasarnya seseorang diperlukan partisipasinya yang menentukan suatu keberhasilan untuk desanya sendiri, untuk itu dari sekian banyak partisipasi maka untuk beberapa hal yang diperlukan dalam hal pembangunan yaitu sebagai berikut:

a. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan

Dimana memberikan ide, gagasan, saran serta kritik dalam hal proses perencanaan pembangunan seperti dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang dapat mendorong masyarakat dalam menyampaikan suatu aspirasinya atau memberikan suatu pemahaman kepada pemerintah tentang pembangunan apa yang dibutuhkan serta hal-hal yang penting bagi masyarakat.

Berikut wawancara dengan kepala desa Gattareng yang menyatakan bahwa:

“penyampaian aspirasi dari masyarakat itu dilakukan dengan musyawarah melalui forum atau rapat koordinasi yang kita laksanakan di desa dan kami juga mengundang dari setiap perwakilan mulai dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, RT, dan tokoh agama yang di fasilitasi oleh BPD”(wawancara S, 22 mei 2021).

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk aspirasi masyarakat kepala desa Gattareng melakukan musyawarah serta mengundang dari setiap perwakilan untuk membahas terkait dengan pelaksanaan atau perencanaan yang akan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk ikut serta dalam menyampaikan aspirasinya.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka dalam pengambilan keputusan pembangunan desa dilakukan seperti berikut ini:

1. kehadiran rapat

Untuk masyarakat sendiri diminta untuk ikut serta dalam pertemuan terkait dengan program apa yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat dilibatkan dalam rapat tersebut baik itu dalam forum maupun dalam korum yang bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat itu sendiri.



Berikut hasil wawancara salah satu masyarakat desa

“ketika adanya pemberitahuan bahwa akan di adakannya rapat maka kita selalu antusias untuk ikut serta dalam menghadiri rapat tersebut yang dimana kita bisa tau rencana apa yang akan dilaksanakan kedepan, program seperti apa nantinya yang akan kita laksanakan, tentu dengan diadakannya rapat seperti itu maka masyarakat juga bisa menyampaikan ide serta saran untuk program tersebut nantinya” (wawancara N A, 21 Mei 2021).

Dalam kebijakan tersebut dalam hal kehadiran rapat sudah baik yang bisa memberikan masyarakat kebebasan dalam berpendapat dengan diadakannya pertemuan secara langsung.

Adapun wawancara dari salah satu masyarakat mengatakan bahwa:

"Dengan diadakannya rapat atau musyawarah biasanya kita di undang setiap perwakilan baik itu dari RT ataupun tokoh masyarakat yang nantinya itu akan di sampaikan kembali pada masyarakat lainnya terkait dengan perencanaan atau pelaksanaan dari hasil rapat tersebut" (wawancara R, 25 Mei 2021).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dari pengadaan rapat itu dilaksanakan yang mengikuti rapat hanya perwakilan saja, dan tentunya dari hal tersebut bisa memberikan masyarakat informasi terkait dengan perencanaan atau pelaksanaan yang seperti apa yang akan di laksanakan atau di programkan selanjutnya.

2. Sumbangan pemikiran

Dalam hal ini untuk sumbangan pemikiran sendiri sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat yang bisa menjadi andalan sehingga masyarakat ikut terlibat untuk menghasilkan pemikiran yang jernih serta obyektif ketika dimintai ide, gagasan, serta saran dalam perencanaan pembangunan.

Berikut hasil wawancara salah satu tokoh masyarakat desa:

“ketika kita diminta untuk berpartisipasi ataupun ikut andil dalam perencanaan pembangunan kita selalu usahakan karena kenapa terkait dengan sumbangan pemikiran, ide, saran yang nantinya ide tersebut akan diterapkan maka kita sendiri yang akan mendapatkan hasilnya dan bisa menguntungkan bagi kita semua yaitu masyarakat itu sendiri” (wawancara I, 21 Mei 2021).

Dalam hal ini tentu memberikan manfaat bagi masyarakat yang langsung diikutsertakan sehingga kemauan masyarakat yang dulunya seperti itu akan terlaksana dengan baik.

Adapun hasil wawancara dari salah satu tokoh pemuda mengatakan bahwa:

“berbicara tentang partisipasi ataupun tanggung jawab kita sebagai pemuda desa Gattareng memang sudah seharusnya kita merealisasikan pemikiran-pemikiran serta ide-ide cemerlang kita untuk kita alirkan terkait dengan pembangunan bagaimana kedepannya bisa dikembangkan” (M I R, 23 Mei 2021).

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk keikutsertaan ataupun keterlibatan masyarakat memang sangat penting untuk keberlanjutan program-program ataupun perencanaan, pelaksanaan pembangunan.

3. Diskusi dan tanggapan ataupun penolakan terhadap program yang di tawarkan

Diskusi ataupun tanggapan terkait dengan program yang ada adalah hal yang melalui suatu perundingan atau pertukaran antara pemikiran satu dengan pemikiran lainnya yang dikritik dalam memperoleh pemahaman mengenai permasalahan ataupun penyebab suatu masalah.

Berikut hasil wawancara salah satu tokoh masyarakat desa:

“Untuk hal diskusi atau tanggapan dalam perencanaan suatu program contohnya pembangunan infrastruktur kita juga memberikan kritik kepada pemerintah desa ketika adanya tawaran program yang akan dilaksanakan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, biasanya kita melakukan diskusi terlebih dahulu, untuk penolakan sendiri kita menyampaikan apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan akan tetapi tergantung dari pemerintah desa apakah pemerintah desa mendengarkan keluhan masyarakatnya atau tidak yang terpenting kita sudah melakukan suatu penolakan ataupun berdiskusi langsung dengan apa yang tidak kita inginkan” (wawancara N A, 21 Mei 2021).

Diskusi serta tanggapan langsung menurut saya sudah baik yang tentunya pasti salah satu masyarakat ada yang tidak setuju terhadap program-program yang nantinya akan di adakan, maka dengan adanya proses diskusi ini pemerintah atau masyarakat bisa mengetahui tentang keresahan masyarakatnya ataupun kemauan pemerintah desa dengan rencana kedepan.

Adapun hasil wawancara dari sekretaris desa mengatakan bahwa:

“semua ide, saran serta gagasan yang diberikan oleh masyarakat kita tampung semua dan nantinya ide-ide yang diberikan dari masyarakat ataupun saran-saran dari masyarakat yang kita anggap memang betul adanya dan berguna untuk pembangunan maka kita

akan terapkan ide-ide tersebut nantinya dan untuk masyarakat yang mungkin ada yang tidak setuju atau memberikan penolakan dalam program yang akan dilaksanakan maka kita juga mendengarkan dan menerima saranya baik itu tentang pelaksanaannya ataupun kegunaanya nantinya tapi kita juga memberikan pemahaman yang lebih atau pengertian bagaimana proses berjalannya program tersebut” (wawancara A, 21 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengambilan keputusan harus memiliki daya tanggap yang baik guna untuk menyaring semua ide yang diberikan oleh masyarakat dan terkait dengan penolakan dalam hal pelaksanaan pasti ada, tetapi untuk hal yang dikatan informan di atas bahwa memberikan pemahaman lebih atau memberikan pengertian itu sudah baik.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan

Dalam hal ini untuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, keterlibatan masyarakat bisa diukur dari bentuk sumbangan materi ataupun tenaga untuk mencapai keberhasilan yang dimana bersama-sama mengerjakan sesuatu sebagai bentuk partisipasi aktif dalam setiap individu untuk ikut andil dalam sebuah pelaksanaan program yang dibutuhkan dari berbagai unsur lainnya.

1. Sumbangan materi

Untuk sumbangan materi sendiri biasanya berupa sumbangan langsung maupun tidak langsung yang membutuhkan ruang yang jumlahnya diukur oleh suatu massa dan melibatkan masyarakat untuk turun langsung dalam hal pelaksanaan program pembangunan contohnya pembersihan jalan dan lain-lainya yang bersifat suka rela

untuk memperlancar suatu pekerjaan dengan tujuan untuk mempermudah suatu pekerjaan tersebut.

Berikut hasil wawancara salah satu masyarakat desa:

“terkait dengan hal ini kita masyarakat pastinya ikut berpartisipasi dengan hal tersebut yang dimana untuk kepentingan bersama dan tentunya kenyamanan masyarakat” (wawancara P, 21 Mei 2021).

Semua masyarakat tentunya memiliki rasa tanggung jawab, untuk itu dalam sumbangan materi ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat baik itu desanya ataupun tempat tinggalnya demi kenyamanan bersama.

Salah satu masyarakat juga mengatakan bahwa”

“biasanya kalau untuk sumbangan materi itu seperti adanya pembangunan masjid atau perbaikan masjid kita beshodaqoh dalam bentuk sumbangan uang walaupun itu tidak seberapa tapi setidaknya bisa membantu karena itu juga kepentingan bersama” (wawancara, M 25 Mei 2021).

Dari hasil wawancara diatas biasanya masyarakat menyisihkan sedikit uangnya tanpa adanya paksaan dan itu benar-benar dari kemauan masyarakat tersebut yang berupa uang, dan hal tersebut sudah baik dalam keikutsertaan dalam bentuk sumbangan materi.

2. Sumbangan tenaga

Sumbangan seperti ini adalah yang masyarakatnya turun langsung seperti adanya pembangunan atau pengelolaan desa yang memberikan tenaganya untuk hal tersebut tanpa adanya sumbangan lainnya dan tanpa adanya campur tangan orang lain untuk menggerakkan suatu badan atau struktur pengelolaan yang memang

dari awal hanya semata-mata untuk memberikan tenaganya dengan sepenuhnya.

Berikut hasil wawancara salah satu masyarakat desa:

“dari awal kita sudah ketahui bahwa dalam hal kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakatnya itu memang perlu adanya sumbangan materi, sumbangan tenaga dan untuk sumbangan tenaga sendiri adalah hal yang paling penting dan dibutuhkan pemerintahan kita karena tenaga yang kita berikan itu memiliki manfaat yang luar biasa, tanpa adanya tenaga dari masyarakat maka sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah desa tidak bisa dikatakan sebagai kerja sama yang baik karena semua hal pasti memerlukan tenaga, untuk itu terkait dengan hal ini sangatlah penting” (wawancara T, 21 Mei 2021).

Dari hasil tersebut maka sumbangan tenaga adalah sesuatu yang memang betul-betul dibutuhkan dalam pelaksanaan dan tidak bisa dipungkiri semua hal baik dari segi finansial ataupun nonfinansial semuanya memerlukan tenaga, dan bukan hanya tenaga bisa dikatakan hanya turun langsung saja atau ikut serta akan tetapi tenaga juga bisa dikatakan seperti memberikan pemikiran yang termasuk dalam sumbangan tenaga.

Adapun wawancara dari kepala desa juga mengatakan bahwa:

“biasanya masyarakat terkait dengan sumbangan tenaga itu berupa keikutsetaan langsung, masyarakat juga ikut membantu seperti halnya dalam bergotong royong dalam pembersihan jalan” (wawancara S, 22 Mei 2021).

Dari hasil wawancara di atas terkait dengan sumbangan tenaga itu sudah dilakukan dengan baik dan masyarakat juga ikut serta dalam bergotong royong.



c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Partisipasi dalam bentuk seperti ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai yang berkaitan dengan kualitas atau tingkat baik buruknya suatu program dan kuantitas yang berkaitan dengan banyaknya suatu program

1. Manfaat material

Manfaat seperti ini biasanya ditemukan pada pemilihan bahan seperti pembangunan yang nantinya akan memberikan manfaat yang baik.

Berikut hasil wawancara dengan kepala desa mengatakan bahwa:

“sebelum kita membuat sesuatu itu kita memerlukan material sebagai bahan pembuatan kemudian manfaat dari material tersebut dapat kita jadikan sesuatu yang bermanfaat contohnya daur ulang dan bangunan yang ada di sekitar kita” (wawancara S, 22 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa memang penting untuk pemilihan bahan terutama untuk

pembangunan karena semakin baik pemilihan bahannya maka semakin baik pula hasil dari pembangunannya.

Adapun wawancara dari salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

"Kita disini memanfaatkan bahan-bahan yang ada yang dapat kita temukan itu seperti kayu, batu, dalam hal pembangunan biasanya kita menggunakan kayu sebagai penopang biasanya seperti itu"(wawancara R, 25 Mei 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan, masyarakat memanfaatkan bahan-bahan alami seperti kayu dan batu yang bisa digunakan sebagai bahan tambahan dalam pembangunan.

2. Manfaat pribadi

Manfaat pribadi ini diperoleh dari seseorang berdasarkan kepentingannya ataupun kebutuhan pribadinya

Berikut hasil wawancara salah satu masyarakat mengatakan bahwa:

"Untuk hal ini keuntungan yang kita dapatkan atau manfaat yang kita rasakan itu tergantung pada diri kita masing-masing contohnya seperti adanya pembangunan pasar bukan hanya satu atau dua orang yang merasakan manfaatnya akan tetapi semua yang beroperasi di dalamnya tapi kembali lagi pada diri kita masing-masing mungkin seperti itu" (wawancara A, 24 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam suatu program pembangunan hal yang dibutuhkan adalah manfaatnya untuk itu pemanfaatan yang didapatkan kembali

pada diri masing-masing bagaimana seseorang bisa memanfaatkan pembangunan dengan baik.

Adapun wawancara salah satu tokoh masyarakat juga mengatakan bahwa:

"Untuk pembangunan itu kembali lagi sama diri kita sendiri bagaimana cara kita memanfaatkannya dan bagaimana juga orang lain menggunakannya atau memanfaatkannya, sesederhana itu kalau mau kita apresiasi bagaimana tentang pemanfaatan untuk diri sendiri" (wawancara A, 24 Mei 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat yang di rasakan kembali lagi pada masing-masing individu bagaimana cara mereka dalam memanfaatkan pembangunan yang sudah ada.

3. Manfaat sosial

Manfaat sosial seperti pendekatan atau peningkatan sosial dengan cara meneliti keinginan dan kebutuhan ataupun konsumsi bagi masyarakat secara keseluruhan.

Berikut hasil wawancara sekretaris desa juga mengatakan bahwa:

"manfaat yang di dapat dari proyek-proyek yang dilaksanakan semua bisa merasakan seperti halnya terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat yang memerlukan suatu pekerjaan dan dari manfaat sosial sendiri bisa membantu tugas-tugas pemerintah seperti peningkatan pendapatan dan perubahan pola kerja" (wawancara A, 21 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu pemanfaatan pembangunan termasuk manfaat

sosial bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam pelaksanaan suatu program untuk mengembangkan pembangunan.

Adapun salah satu masyarakat mengatakan bahwa:

"Contohnya itu adanya pembuatan saluran irigasi di persawahan kan kita bisa nikmati bersama, kita juga bisa merasakan manfaatnya bagaimana, baik itu diri sendiri maupun orang lain" (wawancara A, 25 Mei 2021).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari hal tersebut bisa dikatakan dalam pembangunan, masyarakat memang sudah seharusnya merasakan bagaimana manfaat dari pembangunan tersebut yang dibangun oleh pemerintah/desa.

2. Penerapan prinsip responsibilitas dalam proses pembangunan infrastruktur

Pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan sesuai dengan kebijakan organisasi dan pertanggung jawaban yang masing-masing pelayanan memiliki kesanggupan dari pemberi layanan dalam menetapkan suatu perbuatan dan menerima resiko dari suatu perbuatan, dalam hal pembangunan tentunya memerlukan tanggung jawab yang lebih yang didasarkan ketaatan dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan baik individu maupun kelompok yang mempunyai kepentingan dalam hal pembangunan ataupun lainnya. Adapun beberapa hal yang terkait dengan tanggung jawab atau responsibilitas sebagai berikut:

a. Kejelasan tanggung jawab dan wewenang

Pemerintah desa bertanggung jawab melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang sudah dipercayakan kepada masing-

masing bagian dalam unsur pemerintah desa yang dibebankan sebagai wujud tanggung jawab untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya yang telah dipercayakan kepada setiap pemerintah desa.

Berikut hasil wawancara kepala desa mengatakan bahwa:

“kita melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur yang berlangsung ada di desa, dalam pengawasan sendiri kegiatan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja maka kita akan memberikan teguran dan harus memperbaiki sesuai dengan kontrak kerja dari awal dan apabila tidak sesuai maka yang harus kita lakukan itu maka pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor tidak akan bisa melakukan pencairan dana yang ada dalam kontrak kerja tersebut apabila tidak mengikuti aturan yang sudah disepakati sebelumnya” (wawancara S, 25 Mei 2021).

Dari hasil wawancara tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa apabila perjanjian awal atau aturan yang dari awal tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak mengikuti aturan maka pencairan dana untuk sementara waktu tidak direalisasikan kepada kontraktor yang dimana hasil kerjanya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemerintah desa, untuk itu pemerintah desa memberikan tanggung jawab yang memang betul-betul harus diterapkan baik pada diri sendiri maupun pada pengelolaan dalam pembangunan yang ada di desa.

Untuk menyusun perencanaan dalam suatu proyek diperlukan adanya suatu tujuan yang jelas sehingga bisa dikatakan tanggung jawab yang sebenarnya.

Hasil wawancara dengan ketua BPD terkait dengan tanggung jawab dan wewenang:

“berbicara tentang tanggung jawab kita selaku lembaga-lembaga yang terkait memiliki tanggung jawab penuh atas apa yang kita

kerjakan dan apa yang kita laksanakan, dan kita diberikan wewenang dari pemerintah desa dengan tujuan bisa mengembangkan desa dan tanggung jawab ataupun wewenang yang diberikan harus diperjelas tanpa adanya kesalahpahaman dengan lembaga yang terkait ataupun masyarakat” (wawancara M S, 24 Mei 2021).

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa terkait dengan tanggung jawab dalam menjalankan suatu program maka dari pihak-pihak yang terkait sudah sepantasnya melakukan tugasnya dengan tanggung jawab ataupun wewenang yang sudah diberikan kepercayaan untuk mengelola suatu pembangunan.

Berikut hasil wawancara dengan wakil BPD menyatakan bahwa:

“terkait dengan tanggung jawab atau wewenang yang kita miliki terlebih dahulu karena kita sejalan dengan pemerintah desa maka dari itu kita harus tau dulu pembangunan yang seperti apa yang akan di bangun di desa Gattareng dan secara otomatis BPD harus melihat dulu baru kita menyetujui ataupun di tinjak lanjuti setelah itu kita evaluasi, karena kita disini diberikan tanggung jawab ataupun wewenang untuk mengawasi serta memeriksa atau menyaring kembali pembangunan yang akan diprogramkan nantinya” (wawancara H, 24 Mei 2021).

Dari hasil wawancara di atas terkait dengan tanggung jawab dalam pembangunan bahwa setiap pelaku atau orang yang terlibat masing-masing memiliki tanggung jawab ataupun wewenang untuk berjalannya suatu pembangunan seperti halnya dalam BPD yang memiliki wewenang dalam pengawasan terhadap kinerja kepala desa serta menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa dan untuk itu suatu hal yang akan dilaksanakan harus didiskusikan terlebih dahulu.

b. Memiliki kebijakan pengelolaan sumber daya manusia (SDM)

Hasil wawancara dengan ketua BPD terkait dengan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia mengatakan bahwa:

“pemerintah desa bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di desa Gattareng dalam mengadakan pelatihan-pelatihan terkait dengan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia dan adanya perencanaan, pengarahannya, pengorganisasian serta adanya pengadaan untuk mencapai tujuan sehingga sasaran-sasaran, organisasi dan kemasyarakatan dapat dicapai dan untuk kita itu sebagai pemerintah desa atau yang terlibat di dalamnya kita bisa capai dengan pengelolaan SDM”(wawancara M S, 24 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa berupaya meningkatkan suatu kebijakan dalam hal pengelolaan sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di desa Gattareng.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Gattareng menyatakan bahwa:

“di desa ini kebanyakan masyarakat pendidikannya itu hanya lulusan SMP, SMA bahkan ada masyarakat pendidikannya itu hanya lulusan SD meskipun juga ada masyarakat yang jenjang pendidikannya S1 akan tetapi kebanyakan bekerja di luar desa”(Wawancara S, 22 Mei 2021).

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat kita ketahui bahwa kualitas dari sumber daya manusia masih SDM masih rendah sehingga pengetahuan masyarakat terkait keikutsertaan masyarakat dengan pembangunan desa masih kurang, dan adapun masyarakat yang sudah menempuh pendidikan yang tinggi lebih memilih bekerja di luar desa sehingga masyarakat tersebut tidak ikut andil dalam pembangunan desa.

3. Faktor penghambat partisipasi dan responsibilitas dalam proses pembangunan infrastruktur

Terdapat beberapa faktor penghambat salah satunya keadaan alam desa, tingkat pendidikan masyarakat akan tetapi hal tersebut masih bisa diantisipasi oleh pemerintah itu sendiri, dalam hal ini maka perlu adanya peningkatan motivasi-motivasi untuk meningkatkan efektivitas kerja aparatur pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa mengenai hambatan yang dialami oleh pemerintah desa menyatakan bahwa:

“dari awal kita pantau memang hal-hal yang terkait dengan pembangunan pasti adanya hambatan dalam melibatkan masyarakat desa Gattareng dan ada beberapa namun kita bisa antisipasi hambatan itu, untuk kegiatan pembangunan kita melakukan berbagai cara salah satunya sosialisasi kepada semua pihak bahwa dalam pembangunan desa tidak serta merta hanya aparatur desa saja akan tetapi masyarakat harus terlibat untuk merencanakan serta mengawasi kinerja aparatur desa dan untuk itu pemerintah desa harus terbuka, dan tentunya dengan keterbukaan kita, kami dapat dukungan baik dari masyarakat tanpa adanya kecurigaan, dan untuk itu masyarakat juga antusias untuk ikut serta atau terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan baik itu pembangunan fisik maupun non fisik” (wawancara S. 22 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa berdasarkan administrasinya sudah dapat dikategorikan sudah baik atau berhasil, karena kepala desa dan aparatur terjun langsung kelapangan dalam mensosialisasikan, mengawasi dan memantau setiap kegiatan pembangunan yang ada.

a. Kurangnya kesadaran masyarakat

Dalam pembangunan desa memerlukan partisipasi masyarakat yang bisa menjamin kelangsungan pembangunan akan tetapi dalam suatu perencanaan terdapat beberapa faktor yang sering muncul seperti halnya rendahnya kesadaran dari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa terkait dengan permasalahan yang ada menyatakan bahwa:

“sejauh ini memang adanya faktor yang sering kita temui terkait dengan hal partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu ada sebagian masyarakat di sini kurang berpartisipasi atau tidak peduli seperti halnya dengan gotong royong dan mereka itu lebih mementingkan pekerjaannya sendiri”(Wawancara S, 22 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sebagian dari masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadinya seperti halnya mengerjakan pekerjaannya sendiri daripada ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Wawancara dengan sekretaris desa Gattareng menyatakan bahwa:

“itulah tantangan kami selaku pemerintah desa terkait dengan persoalan masyarakat yang kurang sadar terhadap keterlibatan mereka, masih banyak masyarakat desa yang belum memahami seberapa pentingnya ikut serta dalam pembangunan desa”(Wawancara A, 21 Mei 2021).

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat desa Gattareng belum memahami undang-undang desa bahwa masyarakat berhak untuk meminta serta mendapatkan informasi dari pemerintah desa dan mengawasi pelaksanaan atau kegiatan penyelenggara

pemerintah serta menyampaikan aspirasi, ide-ide, saran baik itu berpendapat dalam bentuk lisan maupun tertulis.

b. Rendahnya tingkat pengetahuan dan pendidikan seseorang

Dalam beberapa hal tingkat pengetahuan penting untuk keberlanjutan suatu program yang dimana langkah awal untuk memulai sesuatu itu memerlukan pengetahuan yang lebih luas untuk keberhasilan dalam program yang akan pelaksanaan

Berikut wawancara dengan sekeretaris desa juga mengatakan bahwa:

“salah satu faktor penghambat dalam pembangunan desa itu masih lemahnya tingkat pengetahuan masyarakat serta kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam bidang pembangunan baik itu dari perencanaan dan pelaksanaannya maupun pemeliharaan hasil kegiatan”(wawancara A, 21 Mei 2021).

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat masih kurang, maka dari itu pemerintah desa atau kepala desa harus memberikan pemahaman terkait dengan pembangunan seberapa pentingnya berpartisipasi di dalamnya sehingga masyarakat desa akan tertarik untuk terlibat dalam pembangunan maupun dalam pengembangan desa.

Berikut wawancara dengan masyarakat juga mengatakan bahwa:

“kita masyarakat hanya bisa bergerak ketika ada perintah dan tuntutan untuk ikut langsung dalam pembangunan karena saya sendiri harus diarahkan bagaimana susunan dalam pembangunan tersebut bagaimana jalannya pembangunan ini karena saya sendiri kurang paham kalau masalah pembangunan saya hanya bisa ikut membantu saja berupa bantuan tenaga” (wawancara C, 25 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan seseorang memang sangat penting untuk proses pembangunan yang maksimal, untuk itu dalam proses

pembangunan harus melibatkan seseorang yang memang banyak mengetahui terkait dengan pembangunan karena tingkat pengetahuan seseorang akan memberikan hasil yang baik pula.

c. Sumber daya manusia (SDM)

Kualitas sumber daya manusia di desa Gattareng masih rendah sehingga pengetahuan masyarakat masih kurang dan keterlibatan dalam pembangunan masih kurang maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat mengatakan bahwa:

“saya tidak tau dan tidak paham apa yang harus saya lakukan atau masyarakat kerjakan ketika ada pembangunan masuk di desa”(wawancara P, 21 Mei 2021).

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kendala pemerintah desa dalam mengikutsertakan masyarakatnya dalam pembangunan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat Gattareng karena masyarakat lebih dominan sebagai petani yang umumnya tidak terlalu mengetahui tentang pemerintahan desa, maka dari perlu adanya sosialisasi dari pihak kepala desa seluruh elemen masyarakat agar masyarakat paham tentang pelaksanaan pembangunan yang ada di desa.

Di desa Gattareng kebanyakan masyarakat status pekerjaannya sebagai petani dan peternak untuk itu kurang maksimal berpartisipasi dalam pembangunan desa dikarenakan lebih memilih pekerjaan mereka.

Berdasarkan wawancara dengan kepala desa Gattareng:

“masyarakat di sini kebanyakan atau rata-rata petani dan peternak maka dari itu mereka kurang terlibat dalam hal

pembangunan dikarenakan soal pekerjaannya masing-masing”(wawancara S, 22 Mei 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih mementingkan pekerjaannya sendiri daripada dibandingkan turun langsung dalam pembangunan untuk kemajuan desa yang dimana memiliki faktor-faktor penghambat seperti halnya dalam rendahnya tingkat pengetahuan dan pendidikan seseorang, adanya perbedaan pekerjaan, keterbatasan usia, dan kurang menanamkan rasa tanggung jawab dengan kepercayaan yang diberikan.

C. PEMBAHASAN PENELITIAN

Dalam beberapa hal memungkinkan adanya suatu keadaan yang membutuhkan partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban dalam melaksanakan suatu hal atau proses pelaksanaan yang sedang berlangsung dan tentunya untuk pembangunan desa sendiri sangatlah penting terkait dengan partisipasi dan responsibilitas atau pertanggungjawaban itu sendiri.

Partisipasi yang dikemukakan oleh Mardikanto (2014) adalah keikutsertaan masyarakat atau seseorang serta sekelompok anggota dalam suatu kegiatan dan dalam kamus Sosiologi Bomby partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari suatu kegiatan dalam memperoleh suatu manfaat (Wahyuddin, 2018).

Untuk partisipasi di desa Gattareng perlu adanya kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur seperti halnya dengan sumbangan pemikiran dalam pengambilan keputusan.



1. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan yang melakukan penilaian serta menjatuhkan penilaian dalam menyelesaikan suatu masalah, adapun menurut para ahli terkait dengan pengambilan keputusan yaitu menurut James A. F Stoner pengambilan keputusan merupakan suatu cara atau proses-proses yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau tindakan dalam permasalahan tersebut (Hayati Zahra, 2019).

Dalam masyarakat itu sendiri ikut terlibat dalam pengambilan keputusan seperti halnya dalam memberikan ide-ide atau pemikiran dalam proses pembangunan desa yang dimana melalui musyawarah perencanaan terkait dengan pembangunan desa Gattareng, sehingga masyarakat dilibatkan atau diikutsertakan dalam pengambilan keputusan dengan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh informan bahwa dalam hal ini masyarakat ataupun pemerintah mengupayakan kebijakan terhadap partisipasi masyarakat secara maksimal, dalam pembangunan desa yang dimana masih tersendak terhadap partisipasi masyarakat yang sebagian dari warga atau masyarakat itu sendiri belum sepenuhnya sadar seberapa pentingnya keterlibatan mereka dalam hal pembangunan di desa Gattareng, untuk itu pemerintah desa dengan masyarakatnya sebaiknya saling bekerja sama dalam pembangunan desa tersebut secara maksimal.

Berkaitan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sudah berjalan dengan baik akan tetapi perlu adanya peningkatan yang memungkinkan suatu saat nanti kualitas perumusan terhadap program dan prioritas dalam pembangunan bukan hanya peringatan ataupun pengendalian kepada masyarakat akan tetapi membutuhkan peningkatan yang lebih ekstra dan perlu juga adanya dukungan dari beberapa aparaturnya yang terkait dalam pelaksanaan tugas pembangunan desa.

Terdapat beberapa hal dalam sumbangan pemikiran dalam proses pengambilan keputusan seperti halnya dalam menghadiri rapat dan ini termasuk sumbangan pemikiran salah satunya memberikan ide atau gagasan terhadap program atau perencanaan terkait dengan pembangunan dan masih banyak lagi sumbangan-sumbangan pemikiran lainnya dari masyarakat yang terdapat dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sumbangan pemikiran dalam pengambilan keputusan terkait dengan pembangunan infrastruktur di desa Gattareng masih perlu peningkatan pemikiran ataupun ide-ide dalam perencanaan suatu desa baik itu sumbangan pemikiran dari masyarakat ataupun saran dari pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk pengambilan keputusan dengan hal pembangunan yang akan dilaksanakan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan

Menurut Abdullah (2014:151) pelaksanaan merupakan suatu proses kegiatan ataupun suatu rangkaian dengan adanya suatu kebijakan seperti pengambilan keputusan yang menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dalam program yang sudah ditetapkan.

Pelaksanaan dengan bentuk seperti ini biasanya berbentuk dalam hal sumbangan tenaga yang dimana masyarakat dari pengurus pembangunan dilibatkan dan ikut serta langsung dalam pelaksanaan pembangunan dalam bentuk sumbangan tenaga dalam bergotong royong demi pencapaian pembangunan yang diharapkan di desa Gattareng.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan bahwa dalam hal partisipasi dalam pelaksanaan di desa Gattareng sudah dapat dikatakan baik dan sudah ada perkembangan dalam hal pelaksanaan ataupun tata kelola jika dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Berkaitan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam hal keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan sudah baik akan tetapi masih perlu peningkatan untuk hal tersebut harus menjadi acuan bagi masyarakat setempat terkhusus kepada pemerintah desa bagaimana caranya agar masyarakatnya terjun langsung terkait dengan pelaksanaan pembangunan agar kedepannya bisa lebih ditingkatkan secara maksimal.

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Hasil pembangunan berawal dari adanya kegiatan atau program yang di buat untuk memberikan manfaat kepada pemerintah ataupun masyarakat, menurut Wiktionary manfaat bisa diartikan sebagai keuntungan ataupun bantuan yang diberikan dan bisa juga diartikan sebagai tindakan kebaikan

Masyarakat serta pengurus pembangunan di desa Gattareng dapat memanfaatkan pembanguan yang sudah ada yang dilakukan oleh pemerintah dengan begitu masyarakat mau memelihara dan menjaga hasil pembangunan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dan dapat memanfaatkan dengan baik dan menggunakan fasilitas pembangunan yang ada di desa Gattareng.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan informan bahwa untuk pembangunan di desa Gattareng yang sudah ada memang seharusnya dipelihara dan dimanfaatkan dengan baik namun untuk kebutuhan masyarakat terkait dengan pembangunan infrastruktur lainnya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

Berkaitan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pembangunan seperti infrastruktur jalan di desa Gattareng masih terbilang kurang baik, dimana jalanan masih dalam kondisi bebatuan, masih banyak jalan yang berlubang, dan pada saat musim hujan kondisi jalan begitu memprihatinkan maka dari itu masih perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah.

Adapun dalam pembangunan memerlukan suatu responsibilitas atau tanggung jawab baik dari pemerintah ataupun dari masyarakat, untuk itu responsibilitas memegang teguh terhadap wewenang yang diberikan dalam menjalankan suatu amanah atau keharusan yang sudah diamanahkan, untuk itu responsibilitas adalah kemampuan aparat dalam mengenali kebutuhan masyarakat, mengembangkan program-program pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti ketersediaan kesempatan dan wadah dalam menyampaikan aspirasi atau saran dan keluhan, daya tanggap desa dalam menghadapi keluhan-keluhan masyarakat yang disampaikan dan semua itu termasuk dalam responsibilitas (Ngengano, 2018). Untuk itu yang terkait dalam responsibilitas dalam suatu pembangunan perlu adanya kejelasan tanggung jawab dan wewenang seperti berikut ini.

1. Kejelasan tanggung jawab dan wewenang

Tanggung jawab (*responsibility*) ialah perasaan menjadi pemimpin bagi diri sendiri dan tidak selalu harus mengecek ulang semua keputusan yang sudah diambil pada saat karyawan mendapat pekerjaan ataupun karyawan yang bersangkutan mengetahui bahwa itu adalah pekerjaannya (Toulson & smith, 1994:457). Penerimaan tanggung jawab dan wewenang berarti individu yang menerima tuntutan pertanggung jawaban yang diberikan oleh atasannya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan bahwa dalam tugas tanggung jawab atau wewenang yang telah diberikan dari

suatu organisasi baik itu pemerintah ataupun masyarakat desa gattareng yang dimana semua pelaku atau pihak yang terkait itu harus melakukan dengan baik dan menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

Berkaitan dengan hasil observasi peneliti bahwa peran masing-masing dalam menjalankan tanggung jawabnya atau wewenangnya dalam proses pembangunan desa di desa Gattareng sudah baik dan tentunya untuk keberhasilan dari pembangunan desa bisa lebih ditingkatkan untuk kelangsungan desa itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat di simpulkan bahwa kejelasan tanggung jawab serta wewenang dalam pembangunan desa di desa Gattareng masing-masing dari pihak yang terlibat sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

2. Memiliki kebijakan pengelolaan sumber daya manusia (SDM)

Kebijakan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) merupakan suatu rangkaian atau asas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan seperti halnya dalam pengelolaan sumber daya manusia yang memiliki faktor yang sangat penting yang tidak bisa lepas dari suatu organisasi yang merupakan penggerak, perencana untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Menurut Edwin B. Filippo (1984) menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengarahan dan pengendalian, pengorganisasian dari pengadaan tenaga kerja dengan pemeliharaan dan pemutusan dalam hubungan kerja yang bermaksud untuk mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan bahwa dalam hal pengelolaan sumber daya manusia itu adalah hal yang sangat penting dimana sumber daya manusia memiliki tempat atau penempatan dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk keberlanjutan suatu pembanguann atau hal lainnya di desa Gattareng.

Berkaitan dengan hasil observasi peneliti bahwa pengelolaan sumber daya manusia di desa Gattareng melakukan kebijakan dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait di desa Gattareng yang berfungsi sebagai penggerak dari kegiatan yang akan dilaksanakan seperti halnya dengan pengelolaan ataupun pengarahan terhadap pemerintah ataupun masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan sumber daya manusia sudah melakukan dengan baik yang dimana kebijakan pemerintah bertujuan untuk kemajuan desanya sebagai performa tenaga kerja dan memastikan bahwa dari semua pihak atau masing-masing tenaga kerja yang ada dalam sumber daya manusia melaksanakan tugasnya atau tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan atau aturan yang sudah ditentukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi dalam proses pembangunan infrastruktur di desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, pertama partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang ikut serta atau terlibat langsung dalam proses pembangunan desa untuk mencapai visi dan misi desa Gattareng, kedua partisipasi dalam pelaksanaan yang bisa memberikan bantuan berupa sumbangan dana, berupa tenaga tanpa mengharapkan imbalan dari hasil kerjanya, ketiga partisipasi dalam pengambilan manfaat adalah baik pemerintah desa ataupun masyarakat menjaga dan merawat pembangunan yang sudah ada.
2. Bagaimana responsibilitas dalam proses pembangunan infrastruktur di desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, pertama kejelasan tanggung jawab dan wewenang yaitu setiap dari anggota organisasi harus punya tanggung jawab dan segala sesuatunya harus dipertanggungjawabkan terhadap apa yang telah diberikan dari pimpinannya terkait dengan wewenangnya itu sendiri, kedua memiliki kebijakan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dimana mengidentifikasi suatu fungsinya sebagai suatu proses perencanaan dalam sumber daya manusia (SDM).

3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat partisipasi dan responsibilitas dalam proses pembangunan infrastruktur di desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, untuk partisipasi sendiri faktor penghambat dalam keikutsertaan masyarakat yaitu adanya faktor internal dan eksternal, dan untuk tanggung jawab sendiri atau responsibilitas baik pemerintah ataupun masyarakat yaitu tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, kurang menanamkan rasa tanggung jawab dalam lingkungan dan kurangnya rasa tanggung jawab dalam mengerjakan tugas atau wewenang yang diberikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang telah disimpulkan di atas maka ada beberapa saran yang penulis kemukakan terkait dengan partisipasi dan responsibilitas masyarakat desa Gattareng dalam proses pembangunan desa

1. Diperlukan adanya optimalisasi pemerintah desa untuk mengoptimalkan masyarakat desa agar masyarakat bisa terangsang untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan infrastruktur guna mewujudkan visi misi desa Gattareng, agar tercapainya suatu kesejahteraan bagi masyarakat desa Gattareng.
2. Untuk informasi terhadap program pembangunan harus disosialisasikan atau dimusyawarakan sehingga masyarakat tergarak untuk terlibat atau berpartisipasi langsung.
3. Pemerintah desa harus memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk membangun desa agar lebih baik dan untuk pemerintah desa sendiri

harus meningkatkan lebih rasa tanggung jawabnya sebagai pemimpin untuk pengelolaan pembangunan desanya tanpa adanya konflik kepada masyarakatnya hanya dengan permasalahan tanggung jawab saja.



DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. (2018). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. *Journal of Materials Processing Technology*, 1(1), 1–8. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024><https://doi.org/10.1016/j.matl.2019.127252><http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>
- Dwi S, A., Indarti, S., & Patrisia, N. E. (2020). Penerapan Responsibilitas Dan Transparansi Layanan Publik Sebuah Kajian Ilmu Administrasi). *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 7(1), 43–48. <https://doi.org/10.37676/professional.v7i1.1091>
- Haeruddin Karnila, A. T. (2016). *Penerapan prinsip good governance terhadap efektivitas perencanaan pembangunan (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari)*. Universitas Hahu Oleo Kendari.
- Hayati Zahra, H. A. (2019). *Teori-teori pengambilan keputusan*.
- Latif, Adam, M. R. (2019). partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Kabupaten Sisenreng Rappang. *Moderat*, 5 nomor 1. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>
- Latif Adam, I. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Moderat*, 5, Nomor 1.
- Mahayana, W. (2013). Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 400–414. ejournal.ip.fisip-unmul.org
- Marina, R. (2018). *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Penelitian di Desa Maaguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)*.
- Ngongano. (2018). *Peran pemerintah desa dalam pembangunan (studi kasus di Desa Laba Besar, Kecamatan Laloda Selatan)*.
- Pebrian, R. (2015). *Responsibilitas Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Cikandang Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut)*. Universitas Padjadjaran.
- Razak, M. R. R. (2018). Partisipasi masyarakat di daerah pegunungan terhadap perwujudan good governance. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 15 No 3.

<https://doi.org/10.37476/akmen.v15i3.319>

- Rompa, M. I. (2020). *peran Kepala Desa Melibatkan Suku To Balo Dalam Kegiatan Pembangunan Di Desa Bulo-Bulo Kecamatan Pujanting Kabupaten Barru*.
- Rosalina Maya. (2013). *Kinerja Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kuala Lapang Dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. Pemerintahan Integratif*.
- Saputri, M. (2019). *Pengaruh Prinsip-prinsip Good Corporate Governance, Pengendalian Internal, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat di Magelang)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sidi. (2014). *Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Geneng Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri*.
- Wahyuddin. (2018). *Analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa tanah karaeng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.





NAMA : MISBAH Riantari

NIM : 105611129217

JUDUL	RUMUSAN MASALAH	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
Partisipasi dan responsibilitas dalam proses pembangunan infrastruktur di desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru	1. Bagaimana partisipasi dalam proses pembangunan infrastruktur di desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru? 2. Bagaimana responsibilitas dalam proses pembangunan infrastruktur di desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru? 3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat partisipasi dan responsibilitas dalam proses pembangunan infrastruktur di desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru?	1. Partisipasi 2. Responsibilitas 3. Faktor penghambat	1. Partisipasi: keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat 2. Responsibilitas: Tanggung jawab atau bagian dari fakta 3. Faktor penghambat: Menghambat atau menentang terjadinya sesuatu.	Informan ✓ Bapak kepala desa Gattareng ✓ Sekretaris desa Gattareng ✓ Bapak ketua BPD ✓ Wakil ketua BPD ✓ Tokoh masyarakat	1. Desain penelitian kualitatif 2. Penentuan informan berdasarkan kriteria yang di tentukan 3. Pengumpulan data: wawancara, observasi, dokumentasi. 4. Analisis data yaitu kualitatif deskriptif

Lampiran 2

Pedoman wawancara

1. Bagaimana keterlibatan masyarakat atau keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur?
2. Bagaimana peran pemerintah dan tokoh masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur?
3. Bagaimana strategi atau gagasan dari pemerintah desa untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur?
4. Permasalahan seperti apa sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam proses pembangunan infrastruktur?
5. Bentuk keterlibatan seperti apa yang dilakukan bapak/ ibu/ saudara dalam proses pembangunan infrastruktur?
6. Apakah seluruh masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi atau hanya perwakilan saja?
7. Mengapa partisipasi masyarakat diperlukan dalam pembangunan infrastruktur?
8. Bagaimana tanggapan saudara jika diikutsertakan dalam pembangunan infrastruktur?
9. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pembangunan infrastruktur?
10. Apakah bapak/ ibu pernah memberikan saran dan kritik mengenai pembangunan infrastruktur?
11. Apakah ada hambatan dalam proses pembangunan infrastruktur?

Lampiran 3

Surat penelitian dari PTSP pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 14121/S.01/PTSP/2021
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Barru

di
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMU Makassar Nomor : 1637/05/C.4-VIII/IV/40/2021 tanggal 22 April 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a :
Nomor Pokok :
Program Studi :
Pekerjaan/Lembaga :
Alamat :

MISSAH RIANTARI
105611129217
Ilmu Adm. Negara
Mahasiswa
Jl. G. Waungalla No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

*** PENERAPAN PRINSIP PARTISIPASI DAN RESPONSIBILITAS DALAM PROSES PEMBANGUNAN DESA DI DESA BATTARENG KECAMATAN BUNJANGINIB KABUPATEN BARRU**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl 30 April s/d 26 Mei 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, data primianya kami menghuj kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini dibagikan secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Makassar
Pada tanggal : 30 April 2021

A.n GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



Dr. JAYADI MAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk II
Nip : 19710501 199003 1 004

Tertembol PTSP
1. Ketua LP3M (Pengarah) Makmur (R. R. R. R. R.)
2. Peneliti



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448935
Website : <http://simas.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



Surat izin penelitian dari kantor Bupati Barru



Lampiran 4

Surat keterangan telah meneliti di desa Gattareng



Lampiran 5

1. Gambar 7.1

Wawancara bersama sekretaris desa Gattareng



2. Gambar 7.2

Wawancara bersama kepala desa Gattareng



3. Gambar 7.3

Wawancara bersama ketua BPD desa Gattareng



4. Gambar 7.4

Wawancara bersama wakil ketua BPD desa Gattareng





5. Gambar 7.5

Wawancara bersama masyarakat desa Gattareng



6. Gambar 7.6

Wawancara bersama ketua RT Dusun Lempang desa Gattareng



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Misbah Riantari, lahir pada tanggal 24 september 1999 di Lempang Kabupaten Barru. Ia merupakan anak tunggal dari pasangan Alimuddin dan Rustia. Peneliti menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya di SD Inpres Lempang Desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru pada tahun 2011. Pada tahun 2014 juga menyelesaikan Sekolah Menengah Pertamanya yakni SMP Negeri 3 Pujananting Kabupaten Barru, lalu melanjutkan pendidikan di jenjang atas yakni di Madrasah Aliyah Negeri 2 Makassar dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi yakni di Universitas Muhammadiyah Makassar program S1 Reguler Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

